

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DI INDONESIA DALAM MENGHAPUSKAN KEMISKINAN
TAHUN 2017**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Disusun oleh:

Dicky Perwira Ompusunggu

NPM: 15 11 21928

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA,
NOVEMBER 2018**

Skripsi

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DI INDONESIA DALAM MENGHAPUSKAN KEMISKINAN
TAHUN 2017**



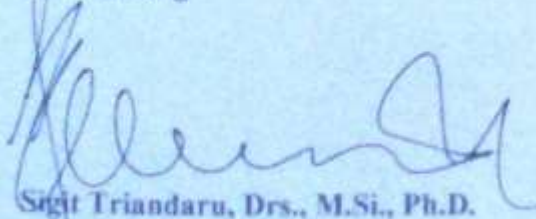
Disusun oleh:

Dicky Perwira Ompusunggu

NPM: 15 11 21928

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing



Sugit Triandaru, Drs., M.Si., Ph.D.

12 November 2018

Skripsi

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DI INDONESIA DALAM MENGHAPUSKAN KEMISKINAN
TAHUN 2017**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

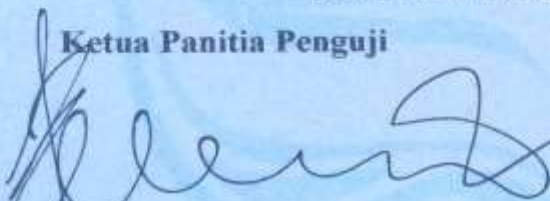
Dicky Perwira Ompusunggu

NPM: 15 11 21928

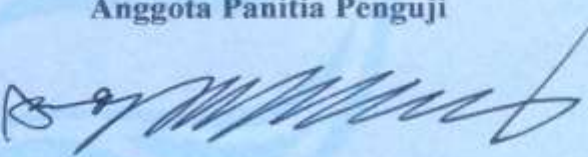
**telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 15 Maret 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana (S1)
Program Studi Ekonomi Pembangunan**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Panitia Penguji


(Drs. Sigit Triandaru, M.Si., Ph.D.)

Anggota Panitia Penguji


(Drs. Andreas Sukanto, M.Si)

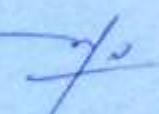

(Yenny Patnasari, S.E., M.Si.)

Yogyakarta, 15 Maret 2019

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.
BISNIS DAN EKONOMIKA

PERNYATAAN

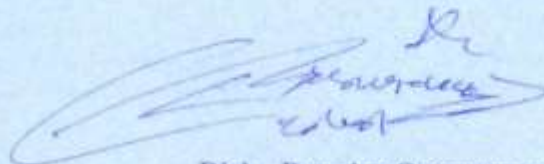
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DI INDONESIA DALAM MENGHAPUSKAN KEMISKINAN
TAHUN 2017**

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan plagiasi pada penyusunan dan pembuatan skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 November 2018

Yang menyatakan



Dicky Perwira Ompusunggu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan, atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian berjudul “Peta Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Dalam Menghapuskan Kemiskinan Tahun 2017”, dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Keluarga tercinta, doa dan dukungan yang selalu diberikan.
- 2) Pembimbing skripsi dan akademik, Bapak Sigit Triandaru, Drs., M.Si., Ph.D.
- 3) Kepala Prodi EP, Bapak Drs. Aloysius Gunadi Brata, S.E., M.Si., Ph.D.
- 4) Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan.
- 5) Sahabat, teman, dan kolega.
- 6) Kader-kader GMKI dan HIPMA-KT
- 7) Rekan-rekan Asrama Kutim dan kedai-kedai di Condong Catur

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan inspirasi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya terhadap masalah yang berkaitan. Terima kasih.

Yogyakarta, 12 November 2018

Dicky Perwira Ompusunggu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1. Latar Belakang	15
1.2. Rumusan Masalah	23
1.3. Tujuan Penelitian	24
1.4. Manfaat Penelitian	25
1.5. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1. Landasan Teori	27
2.1.1. Teori Kemiskinan	27
2.1.2. Kemiskinan	29
2.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	30
2.1.4. Biaya Minimum Penghapusan Kemiskinan	31

2.1.5. Cara Penghapusan Kemiskinan	32
2.1.6. Penghapusan Kemiskinan Secara Langsung	34
2.2. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Data dan Sumber Data	40
3.2. Alat Analisis	40
3.2.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan	41
3.2.2. Biaya Minimal Penghapusan Kemiskinan	42
3.2.3. Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi	43
3.2.4. Pemetaan	46
3.3. Batasan Operasional	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Dana Untuk Menghapuskan Kemiskinan	51
4.2. Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	53
4.2.1. Kemampuan Pendapatan Dalam Menghapuskan Kemiskinan	53
4.2.2. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan	54
4.2.3. Kemampuan Pajak Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan	56
4.2.4. Kemampuan Retribusi Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan	57

4.2.5. Kemampuan Dana Perimbangan Dalam Menghapuskan Kemiskinan	58
4.2.6. Kemampuan Dana Alokasi Khusus Dalam Menghapuskan Kemiskinan	59
4.2.7. Kemampuan Hibah Dalam Menghapuskan Kemiskinan .	60
4.2.8. Kemampuan Belanja Hibah Dalam Menghapuskan Kemiskinan	61
4.2.9. Kemampuan Belanja Bantuan Sosial Dalam Menghapuskan Kemiskinan	62
4.2.10. Kemampuan Belanja Modal Dalam Menghapuskan Kemiskinan	63
4.3. Peta Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	64
4.3.1. Peta Kemampuan Pendapatan Dalam Menghapuskan Kemiskinan	65
4.3.2. Peta Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan.....	67
4.3.3. Peta Kemampuan Pajak Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan	69
4.3.4. Peta Kemampuan Retribusi Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan	71
4.3.5. Peta Kemampuan Dana Perimbangan Dalam Menghapuskan Kemiskinan	73

4.3.6. Peta Kemampuan Dana Alokasi Khusus Dalam Menghapuskan Kemiskinan.....	75
4.3.7. Peta Kemampuan Hibah Dalam Menghapuskan Kemiskinan	77
4.3.8. Peta Kemampuan Belanja Hibah Dalam Menghapuskan Kemiskinan	79
4.3.9. Peta Kemampuan Belanja Bantuan Sosial Dalam Menghapuskan Kemiskinan.....	81
4.3.10. Peta Kemampuan Belanja Modal Dalam Menghapuskan Kemiskinan	83
4.4. Peringkat Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	85
BAB V PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kemiskinan Indonesia, 2014 – 2017	19
Tabel 1.2 Peringkat Persentase Penduduk Miskin Setiap Provinsi	21
Tabel 4.1 Besarnya Dana Yang Dibutuhkan Dalam Menghapuskan Kemiskinan	52
Tabel 4.2 Kemampuan Pendapatan Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	53
Tabel 4.3 Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	54
Tabel 4.4 Kemampuan Pajak Daerah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	56
Tabel 4.5 Kemampuan Retribusi Daerah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	57
Tabel 4.6 Kemampuan Dana Perimbangan Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	58
Tabel 4.7 Kemampuan Dana Alokasi Khusus Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	59
Tabel 4.8 Kemampuan Hibah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	60
Tabel 4.9 Kemampuan Belanja Hibah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	61
Tabel 4.10 Kemampuan Belanja Bantuan Sosial Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	62

Tabel 4.11 Kemampuan Belanja Modal Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	63
Tabel 4.12 Peringkat Kemampuan Keuangan 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	17
Gambar 1.2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Antar Pulau di Indonesia	20
Gambar 4.1 Peta Kemampuan Pendapatan 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	66
Gambar 4.2 Peta Kemampuan Pendapatan Asli Daerah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	68
Gambar 4.3 Peta Kemampuan Pajak Daerah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	70
Gambar 4.4 Peta Kemampuan Retribusi Daerah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	72
Gambar 4.5 Peta Kemampuan Dana Perimbangan 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	74
Gambar 4.6 Peta Kemampuan Dana Alokasi Khusus 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	76
Gambar 4.7 Peta Kemampuan Hibah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	78
Gambar 4.8 Peta Kemampuan Belanja Hibah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	80
Gambar 4.9 Peta Kemampuan Belanja Bantuan Sosial 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	82
Gambar 4.10 Peta Kemampuan Belanja Modal 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	84

Gambar 4.11 Peta Peringkat Kemampuan Keuangan 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan	86
--	----

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DI INDONESIA DALAM MENGHAPUSKAN KEMISKINAN
TAHUN 2017¹**

**Disusun oleh:
Dicky Perwira Ompusunggu
NPM: 15 11 21928**

**Pembimbing:
Sigit Triandaru, Drs., M.Si., Ph.D.**

Intisari

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memetakan kemampuan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan tahun 2017. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan. Alat analisis utama yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan berbagai alat bantu seperti indeks kedalaman kemiskinan, garis kemiskinan, rasio, dan pemetaan.

Hasil penelitian menemukan bahwa kemampuan setiap provinsi berbeda-beda dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Wilayah Indonesia bagian barat umumnya terlihat lebih mampu dalam menghapuskan kemiskinan, dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur. Di wilayah timur Indonesia, provinsi Maluku Utara menjadi yang paling mampu menghapuskan kemiskinan secara langsung di wilayah timur dengan menduduki peringkat ke 3 secara keseluruhan. Di wilayah bagian tengah, Kalimantan Timur dan Utara, serta Bali menjadi provinsi yang menduduki peringkat 9 besar. Wilayah barat yang menduduki peringkat atas adalah DKI Jakarta dan Kep. Bangka Belitung. Tiga provinsi dengan peringkat kemampuan terendah dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung menggunakan APBD, ada pada provinsi di wilayah timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Sedangkan tiga provinsi peringkat teratas adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara.

Kata Kunci: kemiskinan, kemampuan, pemetaan

¹ Versi singkat skripsi ini telah dimuat dalam bentuk artikel yang berjudul “*Mapping Government’s Financial Capacity To End Poverty: The Case of Provinces in Indonesia*” dan dipresentasikan dalam *4th Advances in Economics and Business Issues Research International Conference 2019* (AEBIRIC 2019) pada 26-28 April, di Melaka, Malaysia.

BAB I

PENDAHULUAN

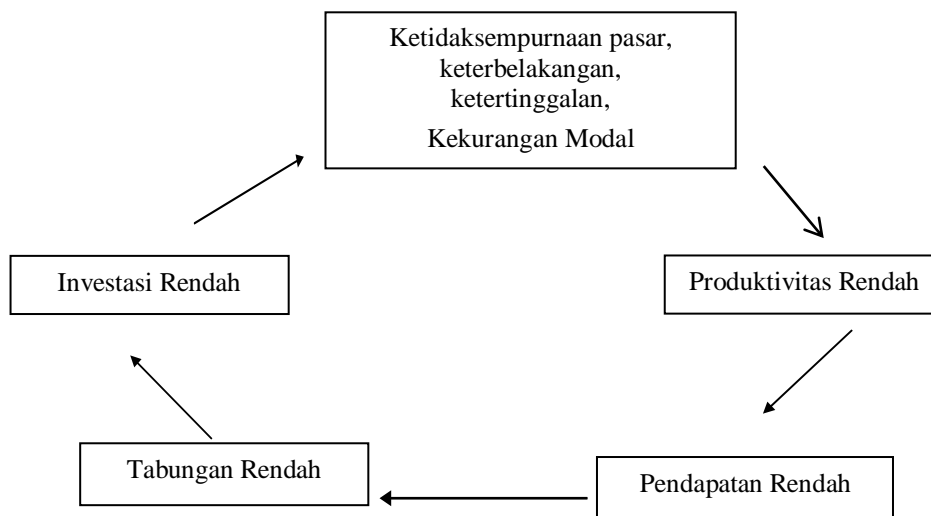
1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan utama pembangunan Negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengertian kesejahteraan umum menurut Lambert dan Ramos (2002), adalah kondisi dimana keseluruhan masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhannya untuk hidup layak, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sosial maupun ekonominya. Kesejahteraan suatu negara itu sendiri dapat dicerminkan salah satunya melalui tingkat kemiskinan penduduk di negara tersebut. Tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang kontradiksi dengan kesejahteraan umum, sehingga semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu Negara, maka menggambarkan kesejahteraan penduduk yang semakin rendah, begitupun sebaliknya.

Dalam sejarah peradaban manusia, kemiskinan adalah masalah mendasar yang selalu mengiringi pembangunan negara-negara di dunia, masalah ini terlihat jelas terutama pada berbagai negara berkembang. Banyak kalangan maupun ekonom yang sejak lama sudah sadar betapa pentingnya mengatasi masalah tersebut, misalnya seorang tokoh ekonomi terkemuka pada abad XVIII, yaitu Adam Smith yang menyatakan bahwa jika sebagian besar penduduk hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan, maka masyarakat yang makmur dan bahagia hanya impian semata (Todaro dan Smith, 2006).

Lebih lanjut Bank Dunia (1990) dalam laporannya pada sidang PBB mengungkapkan bahwa, pembangunan manusia seharusnya tidak fokus pada aspek ekonomi saja, tapi yang lebih penting adalah aspek pendidikan secara universal bagi orang miskin, guna memperbaiki kehidupan sosial ekonominya. Karena itu pada bulan September tahun 2000, lahir lah deklarasi *Millennium Development Goals* (MDG) dalam sidang PBB yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan.

Sebelum muncul teori kutukan sumberdaya (*resource curse theory*), yang menyebutkan bahwa kemiskinan suatu negara disebabkan oleh melimpahnya sumberdaya di negara tersebut (Sachs dan Warner, 2001), Ragnar Nurkse (1953) menjelaskan bahwa siklus kemiskinan sebenarnya bermotif sama dengan lingkaran setan. Pada keadaan miskin masyarakat maupun wilayah tersebut terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keterbelakangan gizi, minimnya pendidikan, infrastruktur yang belum memadai, lalu ketidaksempurnaan pasar terutama dalam hal informasi, serta kurangnya modal menjadikan produktivitas masyarakat menjadi rendah. Rendahnya produktivitas berdampak pada jumlah pendapatan yang mereka terima. Semakin sedikit pendapatan yang diterima akan berimplikasi pada tabungan dan investasi yang jumlahnya semakin kecil bahkan tidak ada. Sehingga rendahnya investasi bahkan tidak adanya investasi pada akhirnya menimbulkan keterbelakangan gizi, dan siklus ini akan terus menerus menjebak masyarakat dalam lingkaran kemiskinan (*poverty circle*).



Sumber: Nurkse (1953) (diolah)

Gambar 1.1
Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Menurut Kunarjo (2002), lingkaran setan tersebut dimulai dari pendapatan yang rendah, selanjutnya mempengaruhi besarnya tabungan yang semakin rendah bahkan sampai tidak ada. Akhirnya sumber daya manusia (tingkat pendidikan dan kesehatan) yang tersedia tidak cukup berkualitas, sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas yang nantinya kembali mempengaruhi pendapatan.

Penanggulangan kemiskinan sendiri bisa diatasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah otonomi daerah. Otonomi melalui desentralisasi fiskal, merupakan salah satu instrumen terbaik dalam menanggulangi kemiskinan. Adanya keterkaitan desentralisasi fiskal dalam menanggulangi kemiskinan sudah beberapa kali di uji dalam studi empiris. Salah satunya penelitian Boex, dkk (2006), walaupun berbeda makna, konsep penanggulangan kemiskinan dan sistem desentralisasi memiliki beberapa kesamaan, yang terpenting dari kesamaan tersebut adalah keduanya sangat erat dengan pemberdayaan (*empowerment*), dimana desentralisasi adalah wujud pemberdayaan terhadap pemerintah daerah,

sementara penanggulangan kemiskinan juga wujud pemberdayaan suatu kelompok masyarakat miskin.

Selanjutnya studi yang dilakukan Braun dan Grote (2000), menyimpulkan bahwa jika desentralisasi diberikan proporsi yang besar pada semua aspek, maka akan mengubah baik buruknya pelayanan kepada masyarakat miskin. Desentralisasi memiliki potensi dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, sistem ini memiliki rasionalitas yang lebih baik dalam memenuhi layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Kemiskinan yang sedang kita bahas menyangkut hilangnya komponen kesejahteraan seperti kebutuhan dasar, kesehatan, dan pendapatan. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kemiskinan akan sangat terbantu oleh kebijakan desentralisasi karena hubungannya yang positif dan sifatnya yang saling bersinergi.

Indonesia sebagai negara berkembang, walaupun tingkat kemiskinan sudah 1 (satu) digit pada 2018, tetapi masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup parah karena efek dari jumlah penduduk itu sendiri. Menurut infografis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 1.1, jumlah penduduk miskin tidak kurang dari 26,58 juta orang (desa dan kota). Besarnya persentase penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya semakin berkurang, dari tahun 2014 banyaknya penduduk miskin sebesar 28,59 juta (11,25%), 2015 persentase penduduk miskin ini mengalami penurunan hingga menjadi 11,13%, namun jika dalam perorangan jumlahnya tetaplah besar karena mencapai lebih dari 28 juta jiwa.

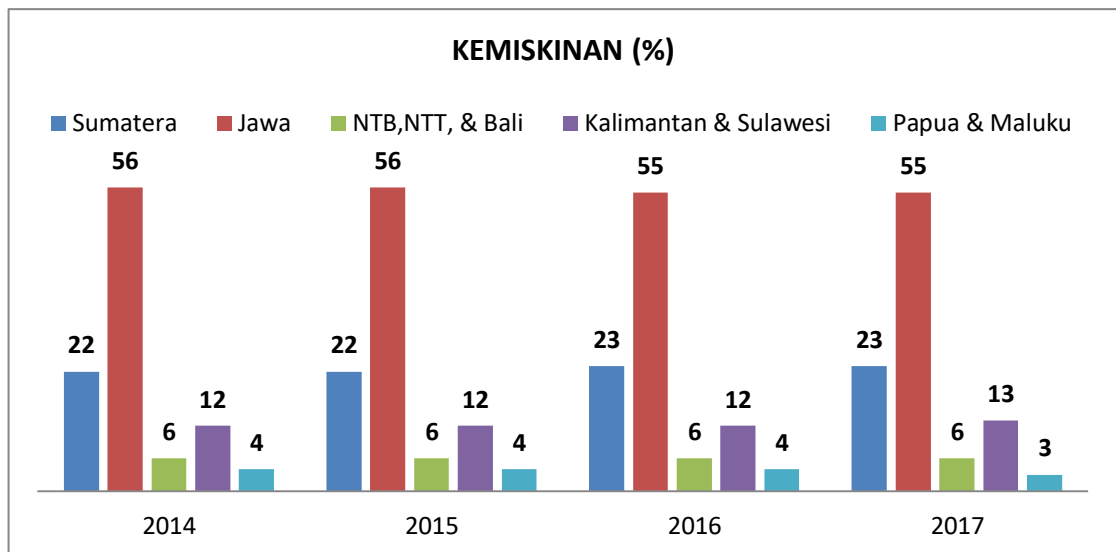
Tabel 1.1
Data Kemiskinan Indonesia, 2014-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Mar-14	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25
Sep-14	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96
Mar-15	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22
Sep-15	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13
Mar-16	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86
Sep-16	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,7
Mar-17	10,67	17,1	27,77	7,72	13,93	10,64
Sep-17	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12

Sumber: BPS (2017) (diolah)

Setahun sebelum 2017, terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,43% sehingga besarnya tingkat kemiskinan berada pada 10,70% atau sebanyak 27 juta jiwa. Pada tahun 2016 ini pemerintah mempublikasi rencana target tingkat kemiskinan sebesar 1 (satu) digit. Di tahun 2018 ini data terbaru publikasi BPS menunjukkan persentase kemiskinan terendah semenjak 1999, pada bulan maret BPS mencatat persentase kemiskinan sebesar 9,82%, yang berarti jumlah penduduk miskin yang pengeluaran per kapita/bulan berada di bawah garis kemiskinan sudah turun menjadi 25,95 juta orang.

Dari seluruh penduduk miskin di Indonesia tahun 2014-2018 (25-28 juta jiwa), populasinya tersebar tidak merata di 34 provinsi di Indonesia. Dalam Tabel 1.2 jika penduduk miskin disegmentasi berdasarkan pulau-pulau besar, maka pulau Jawa merupakan konsentrasi kemiskinan terbesar yaitu kisaran 55-56%. Kedua adalah pulau sumatera yang menyumbang 22-23% dari total penduduk miskin, diikuti Kalimantan dan Sulawesi sebesar 12-13%, Bali dan sekitarnya 6%, dan yang terakhir Papua, Maluku, dan sekitarnya sebesar 3-4%.



Sumber: BPS (2017) (diolah)

Gambar 1.2
Persentase Jumlah Penduduk Miskin Antar Pulau di Indonesia

Gambar 1.1 hanya menginformasikan penyebaran penduduk miskin di Indonesia, sedangkan untuk mengetahui persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di masing-masing provinsi, ada pada pada Tabel 1.2. Peringkat pertama banyaknya penduduk miskin berada di provinsi Papua, di urutan kedua sampai kelima masih berada pada wilayah Indonesia Timur, dan sampai pada 10 besar Provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar, tidak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang masuk, bahkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah ada pada DKI Jakarta dan Bali. Data yang saling berseberangan ini terjadi karena ketimpangan jumlah penduduk di antara pulau-pulau di Indonesia yang cukup besar, sehingga pengaruhnya terhadap persentase masyarakat miskin semakin besar.

Dalam menggunakan APBD melalui otonomi daerah untuk menangani masalah kemiskinan, sebenarnya sudah ditunjang melalui berbagai regulasi.

Tabel 1.2
Peringkat Persentase Penduduk Miskin Setiap Provinsi

No	Provinsi	2015	2016	Selisih	Peringkat
1	Nanggroe Aceh Darussalam	28.28	26.65	1.63	6
2	Sumatera Utara	15.01	13.9	1.11	18
3	Sumatera Barat	12.51	11.9	0.61	22
4	Riau	11.85	11.2	0.65	24
5	Jambi	11.37	10.27	1.1	27
6	Sumatera Selatan	20.99	19.15	1.84	14
7	Bengkulu	23	22.13	0.87	10
8	Lampung	22.77	22.19	0.58	9
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.91	9.54	1.37	28
10	Kepulauan Riau	12.16	10.3	1.86	26
11	DKI Jakarta	4.57	4.61	-0.04	33
12	Jawa Barat	14.49	13.55	0.94	19
13	Jawa Tengah	22.19	20.43	1.76	12
14	DI Yogyakarta	19.15	18.99	0.16	16
15	Jawa Timur	21.09	19.98	1.11	13
16	Banten	9.79	9.07	0.72	30
17	B a l i	7.08	6.63	0.45	32
18	Nusa TenggaraBarat	27.17	24.99	2.18	7
19	Nusa TenggaraTimur	29.34	27.51	1.83	4
20	Kalimantan Barat	15.24	12.91	2.33	20
21	Kalimantan Tengah	11	9.38	1.62	29
22	Kalimantan Selatan	8.32	7.01	1.31	31
23	Kalimantan Timur	11.41	11.04	0.37	25
24	Sulawesi Utara	11.54	11.42	0.12	23
25	Sulawesi Tengah	23.63	22.42	1.21	8
26	Sulawesi Selatan	14.57	14.11	0.46	17
27	Sulawesi Tenggara	23.37	21.33	2.04	11
28	Gorontalo	29.13	27.35	1.78	5
29	Sulawesi Barat	20.74	19.03	1.71	15
30	Maluku	33.03	31.14	1.89	3
31	Maluku Utara	12.73	11.97	0.76	21
32	Papua Barat	41.34	39.31	2.03	2
33	Papua	41.52	40.78	0.74	1
34	Kalimantan Utara	-	-	-	-

Sumber: BPS (2017) (diolah)

UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 bahkan disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33

Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sudah cukup menjelaskan peran daerah dalam mengatasi masalah daerah. Sehingga seharusnya pemerintah daerah melalui APBD dimungkinkan mampu mengatasi kemiskinan yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Namun adanya otonomi daerah dan peningkatan belanja pemerintah melalui APBD, ternyata belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemiskinan (Paramita, 2013). Penelitian dengan topik pengaruh APBD dan Dana Alokasi Umum (DAK) terhadap IPM di berbagai kota Makassar ini, mencari penyebab utama mengapa belanja pemerintah dan otonomi daerah tidak berpengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan. Ini terjadi karena pada alokasi dan distribusi APBD, kebijakan yang dikeluarkan cenderung mengarah pada kepentingan belanja rutin birokrasi, sehingga pengalokasian anggaran untuk menanggulangi kemiskinan menjadi kurang efektif.

Selanjutnya penelitian Kusreni dan Suhab (2009), tentang Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan variabel kapasitas fiskal, belanja modal, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal provinsi Sulawesi Selatan (penerimaan umum bukan DAK, DPL, dan pendapatan lainnya) lebih mempengaruhi kesejahteraan masyarakat daripada belanja modal. Kemudian penelitian Sasana (2012), tentang pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan perkapita terhadap IPM di semua Kabupaten Jawa Tengah menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah tidak signifikan terhadap fluktuasi Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, secara garis besar penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Kedua cara ini tetap membutuhkan pengelolaan APBD yang baik, namun cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara yang tidak langsung (melalui *multiplier*) ini masih terkendala banyak hal seperti birokrasi, alokasi anggaran, realisasi anggaran, tahapan dan waktu pengentasan kemiskinan yang panjang, dan sebagainya. Selain itu, untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mengentaskan kemiskinan pada tahun 2017, cara yang paling mungkin dilakukan sebagai pendekatan untuk mengukur kemampuan setiap daerah, adalah dengan menggunakan cara langsung.

Selain untuk menghindari berbagai masalah yang dialami dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara tidak langsung, cara langsung memungkinkan peneliti untuk mengkuantifikasi lebih tepat, dalam suatu indikator mampu tidaknya keuangan suatu daerah mengentaskan kemiskinan. Ditambah lagi cara langsung dalam menghapuskan kemiskinan bisa ditentukan/*framing* dalam kurun waktu tertentu, dalam hal ini tahun 2017, karena sifatnya yang instan (langsung berlaku). Berbeda dengan cara tidak langsung yang membutuhkan waktu pengentasan kemiskinan lebih lama (tidak bisa dalam 1 tahun), serta pengkuantifikasian yang bias dan sulit. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin mengukur, memetakan dan menjelaskan bagaimana kemampuan keuangan setiap pemerintah provinsi (melalui 10 komponen APBD yang dipilih) dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung, dengan

menggunakan APBD yang diberikan secara langsung kepada rakyat miskin, untuk menutup jurang kemiskinan pada tahun 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan susunan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kemampuan Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan di setiap Provinsi dalam menghapuskan kemiskinan di masing-masing Provinsi?
- 2) Bagaimanakah kemampuan Dana Alokasi Khusus, Hibah, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal di setiap Provinsi dalam menghapuskan kemiskinan di masing-masing Provinsi?
- 3) Bagaimanakah peta kemampuan keuangan masing-masing pemerintah Provinsi dalam menghapuskan kemiskinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun sebelumnya, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan masing-masing Provinsi dalam menghapuskan kemiskinan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Dana Alokasi Khusus, Hibah, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal masing-masing Provinsi dalam menghapuskan kemiskinan.

- 3) Untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah Provinsi dalam menghapuskan kemiskinan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif untuk:

- 1) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan pedoman dalam merumuskan suatu kebijakan, khususnya kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan di tingkat Provinsi karena didasari informasi tentang kemampuan keuangan daerah.

- 2) Peneliti

Hasil penelitian dapat digunakan peneliti selanjutnya sebagai pedoman dan referensi, dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian yang akan datang diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan metode-metode yang lain, bahkan dengan variabel-variabel lain.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dimulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat kajian literatur tentang kemiskinan, landasan teori dan studi atau riset terdahulu yang terkait dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai data, sumber data, alat analisis yang digunakan dan batasan operasional dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan serta menganalisis hasil penelitian dan pembahasan yang bersifat terpadu, mengenai dana yang dibutuhkan untuk menghapus kemiskinan, kemampuan komponen-komponen APBD dalam menghapuskan kemiskinan, dan pemetaan kemampuan tersebut di setiap provinsi di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran (implikasi kebijakan) penelitian yang dinyatakan secara terpisah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kemiskinan

Teori-teori tentang pemahaman kemiskinan dan penanggulangannya umumnya bermuara pada dua sudut pandang. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Terdapat perbedaan yang terlihat jelas diantara kedua paradigma ini, yaitu dalam melihat akar penyebab kemiskinan dan solusi penyelesaian kemiskinan, berikut penjelasan yang dimaksud:

1. Neo-Liberal

Pandangan ini menempatkan mekanisme pasar bebas dan kebebasan individu sebagai fokus utama (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini menganggap pasar adalah solusi dalam menghapuskan kemiskinan, karena mekanisme pasar bebas, memaksa individu untuk mengikuti arus yang sudah ada. Mengapa individu yang secara tidak langsung bisa diatur dalam mekanisme pasar bebas, dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan?. Karena dalam paradigma ini kemiskinan adalah masalah masing-masing individu, yang terjadi sebagai akibat dari keputusan pilihan individu tersebut (Syahyuti, 2006: 95).

Bank dunia telah menjadi penggerak penggunaan kajian melalui pendekatan neo-liberal ini, sehingga dalam mengkaji kemiskinan teori ini menekankan pada penggunaan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan produksi sebagai suatu indikator (Suharto, 2009). Keuntungan pendekatan ini

adalah mudah mengukur kemiskinan dan segala komponennya karena menggunakan klasifikasi kemiskinan absolut, tetapi kelemahan pendekatan ini adalah, kemiskinan yang hanya dilihat dari segi kuantitas seperti pendapatan (Todaro dan Smith, 2006). Sehingga subjektivitas orang miskin itu sendiri menjadi berkurang, dan bentuk kemiskinan dalam dimensi sosial yang sulit diukur menjadi tidak diperhatikan. Akhirnya bentuk kemiskinan yang berbeda tidak dapat ditangkap semuanya, sehingga akar permasalahan kemiskinan tidak dapat ditentukan secara tepat.

2. Demokrasi-Sosial

Berbeda dengan neo-liberal, paradigma ini melihat kemiskinan sebagai masalah struktural (Cheyne *et al*, 1998). Secara fundamental, ketidakadilan dan ketimpangan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat tertentu dalam mengakses banyak hal, dan selanjutnya mengakibatkan kemiskinan. Pendekatan demokrasi-sosial menekankan keadilan bagi semua orang untuk mendapatkan sumber daya bagi pengembangan dirinya, seperti kesehatan yang baik, pendidikan yang layak, dan yang paling penting adalah kebebasan (Syahyuti, 2006 : 95).

Kebebasan yang dimaksud adalah keleluasaan memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan individu maupun kemasyarakatan, dimana setiap orang dimungkinkan untuk menentukan pilihan dan kebutuhannya sendiri. Sehingga peran negara sangat penting, untuk turun menghapus kemiskinan. Pendekatan ini cenderung mengandalkan negara dalam pengentasan kemiskinan, karena bagi paradigma ini, kemiskinan bisa diatasi secara kelembagaan seperti dana pensiun, jaminan sosial, tunjangan, dsb.

Teori ini memberikan pemahaman baru bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan kemampuan individu, tetapi juga disebabkan struktur dan institusi yang menyebabkan tertutupnya akses tertentu ke masyarakat tertentu. Tentu terdapat kelemahan dalam pendekatan ini, yaitu ketergantungan penanggulangan kemiskinan terhadap negara yang sangat tinggi, padahal perbaikan suatu institusi dan struktur di kelompok miskin tersebut, dipengaruhi kapabilitas masyarakat miskin itu sendiri. Selain itu penggunaan kemiskinan relatif, mempersulit klasifikasi kebutuhan standar agar orang dikatakan tidak miskin, hal ini terjadi karena kemiskinan lebih dilihat dari kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dan bukan dilihat melalui nilai minimal tertentu yang harus dicapai.

2.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensional, sehingga dalam pengertiannya bisa didefinisikan dari berbagai aspek (Wahyudi, 2011). Aspek politik dalam kemiskinan bisa dilihat sebagai tingkat akses terhadap sistem politik dan kekuasaan, yang mempengaruhi dapat tidaknya sekelompok masyarakat dalam mendapatkan dan menggunakan suatu sumber daya. Selanjutnya aspek sosial, melihat kemiskinan sebagai kurangnya kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, karena pengaruh tingkat struktur sosial dan kekurangan jaringan. Dalam pandangan ekonomi, kemiskinan dilihat sebagai rendahnya kesejahteraan sekelompok orang, karena sumber daya yang tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut pengertian kemiskinan menurut pendapat beberapa pihak, diantaranya:

- a. BPS mengartikan kemiskinan sebagai seorang individu yang dari sisi

pengeluarannya, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non-makanan). Sehingga dikatakan penduduk tersebut miskin, jika rata-rata pengeluaran perkapita/bulan berada di bawah garis kemiskinan.

- b. World Bank (2001) mengartikan kemiskinan sebagai situasi yang tidak memiliki kepastian masa depan, ketidakberdayaan, kerentanan pada segala aspek, serta hilangnya kebebasan.
- c. Menurut Yao (2007), kemiskinan adalah kondisi kekurangan pangan, papan, pendapatan, dan kesempatan kerja. Lebih luas lagi kemiskinan bisa diartikan sebagai ketiadaan sanitasi, fasilitas kesehatan, bahkan ketidakmampuan baca tulis.

Berdasarkan standar pengukuran, kemiskinan dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (BPS, 2009). Kemiskinan absolut merupakan standar dari hasil penilaian berdasarkan standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Standar minimum itu menjadi suatu batas yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*), yang menjadi acuan tidaknya seseorang disebut miskin. Kedua, kemiskinan relatif merupakan standar hidup yang besarnya tidak terkuantifikasi, karena dipakai dalam area tertentu dan ditentukan secara subjektif oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat yang berada di bawah standar tersebut dapat dikatakan miskin relatif.

2.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

BPS menggunakan tiga indeks untuk mengukur kemiskinan. Pertama Indeks Kemiskinan atau Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index*) dengan simbol (P_0) digunakan untuk menghitung persentase populasi keluarga yang

pengeluaran per kapitanya masih di bawah garis kemiskinan. Kedua adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) dengan simbol (P_2), yang menggambarkan penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin serta kesensitivitasan distribusi pendapatan orang miskin. Terakhir yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) disimbolkan (P_1), Indeks ini mengukur rata-rata kesenjangan dari pengeluaran per kapita penduduk miskin per bulan terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks, semakin kecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin pada garis kemiskinan, yang berarti kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin membaik, begitupun sebaliknya. Berikut persamaan matematis Indeks kedalaman Kemiskinan (BPS, 2017) :

$$P_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \left(\frac{G_k - Y_i}{G_k} \right)^a$$

Dimana:

P_a = Indeks Kedalaman Kemiskinan

G_k = Garis Kemiskinan

Y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i= 1,2, \dots, n$), $Y_i < G_k$

$\alpha = 1$

N = Jumlah penduduk

2.1.4. Biaya Minimum Penghapusan Kemiskinan

Milanovic (2002) mengungkapkan bahwa kedalaman kemiskinan bisa didefinisikan sebagai jumlah uang yang harus diberikan untuk mengangkat orang

miskin setara dengan garis kemiskinan. Dari indeks kedalaman kemiskinan, kita dapat mencari pendekatan solusi kemiskinan yang dimaksud, dengan mengembangkan formula tersebut, hasil nilai yang didapat merupakan kalkulasi dari menghitung selisih antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk miskin, sehingga kita dapat memperkirakan besarnya dana yang diperlukan untuk menghapuskan kemiskinan (Khandker dan Haughton, 2009). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$P_b = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \left(\frac{G_k - Y_i}{G_k} \right)^a \times N \times G_k = \sum_{i=1}^n (G_k - Y_i)^a$$

Dimana:

P_b = Biaya Minimal Penghapusan Kemiskinan

G_k = Garis Kemiskinan

Y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i= 1,2, \dots, n$), $Y_i < G_k$

$\alpha = 1$

N = Jumlah penduduk

2.1.5. Cara Penghapusan Kemiskinan

Dalam upaya untuk menghapuskan kemiskinan, berbagai cara dapat digunakan oleh semua pihak termasuk pemerintah. Pemerintah melalui berbagai lembaga dan instrumen negara, tentu mampu mengatasi kemiskinan melalui kebijakan yang diterapkan. Menurut Suprayitno (2017), kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan diantaranya:

a. Pengeluaran Berupa Barang Publik

Dalam komponen-komponen pengeluaran pemerintah, salah satu hal yang sangat substansial adalah penyediaan barang modal. Adanya barang modal seperti infrastruktur jalan, air, listrik dan barang publik sangat diperlukan untuk menunjang perekonomian di suatu wilayah. Salah satu manfaat dari perekonomian yang semakin membaik, adalah meningkatnya taraf sosial-ekonomi para pelaku perekonomian ke arah yang lebih baik. Sehingga, sebesar apapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk pengeluaran, jika tidak ditujukan untuk menyediakan barang publik, maka tidak akan mengubah kondisi perekonomian dan akan mempersulit setiap orang untuk memperbaiki perekonomiannya.

b. Distribusi Pendapatan Melalui Subsidi

Subsidi adalah kebijakan redistribusi pendapatan untuk memberikan tambahan daya ekonomi bagi golongan tertentu seperti masyarakat miskin. Daya yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada suatu rumah tangga atau perusahaan, untuk menyediakan atau mengkonsumsi suatu barang. Subsidi tersebut bisa diterapkan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

- i. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- ii. Kupon untuk mendapatkan sejumlah komoditas tertentu
- iii. Diskon pada komoditas tertentu

c. Distribusi Pendapatan Melalui Pajak

Berbanding terbalik dengan subsidi, pajak merupakan kebijakan redistribusi pendapatan dengan membebankan lebih besar kewajiban yang harus dipenuhi oleh golongan yang dianggap kaya/mampu. Hasil dari kewajiban pajak tersebut, salah satunya digunakan untuk melakukan kebijakan subsidi seperti pada

poin b. Sehingga, distribusi pendapatan akan semakin merata, dan berguna untuk mengurangi ketimpangan, dan mengatasi kemiskinan

d. Pengembangan *Human Capital*

Manusia sebagai objek kemiskinan, tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menghapuskan kemiskinan itu sendiri. Pemerintah memandang peningkatan modal/aset manusia (*human capital*) sebagai suatu pekerjaan yang sangat penting dan harus didahulukan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia, diantaranya:

- i. Peningkatan kualitas kesehatan
- ii. Pemberian pendidikan
- iii. Pengadaan pelatihan dan magang

2.1.6. Penghapusan Kemiskinan Secara Langsung

Dalam buku yang berjudul *The End of Poverty*, Sachs (2005: 288-292) menerangkan bahwa kemiskinan yang ekstrim bisa dihapuskan secara total, tetapi tidak untuk kemiskinan secara keseluruhan. Cara yang dimaksud untuk menghapuskan kemiskinan tersebut adalah dengan menutup jarak (*gap*) antara orang miskin dengan orang yang tidak miskin. Caranya dilakukan dengan menaikkan pendapatan, untuk menaikkan pendapatan orang miskin melalui pemberian sejumlah dana tertentu secara langsung.

Besarnya jarak (*gap*) yang dimaksud di buku tersebut, sebenarnya mencerminkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk menghapuskan kemiskinan dengan cara mengangkat orang miskin setara dengan garis kemiskinan (Milanovic, 2002). Karena yang ingin diangkat adalah pendapatan orang miskin

yang nantinya mempengaruhi pengeluaran, maka yang harus diberikan kepada masyarakat miskin hanya dalam bentuk uang. Agar cara tersebut langsung mempengaruhi kemiskinan, maka harus diberikan secara langsung atau disebut transfer tunai, untuk menghindari perubahan uang kedalam bentuk yang lain.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Anand (1983) dalam mengukur langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Malaysia, melakukan analisis mendalam tentang aspek-aspek kemiskinan yang terjadi di Malaysia. Variabel yang diteliti adalah pendapatan, pengeluaran, dan garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dan menariknya keluar dari kemiskinan yaitu dengan menjabarkan kedalaman kemiskinan (*poverty gap*) dan ukuran kemiskinan Sen (*the Sen poverty measure*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab kemiskinan di Malaysia adalah ketimpangan pendapatan. Kemiskinan di Malaysia dapat diukur, dan dapat diatasi dengan berbagai macam cara, bahkan cara-cara yang ekstrim seperti mengambil uang yang kaya untuk dibagikan kepada yang miskin, ini dilakukan untuk mengisi ketimpangan pendapatan tersebut, sehingga pendapatan orang miskin bisa naik di atas garis kemiskinan.

Selanjutnya, Durongkaveroj (2018) meneliti tentang besarnya injeksi minimum untuk menghapuskan kemiskinan di Thailand. Kajian ilmiah tersebut dilakukan dengan pendekatan indeks kemiskinan Foster Greer Thorbecke dan keterkaitan pengganda SAM. Kajian ini mengasumsikan bahwa semua orang bekerja di dalam bidang industri, sehingga rata-rata pengeluaran perkapita setiap orang miskin, sama dengan output yang mereka hasilkan dalam industri yang

merupakan pendapatan setiap orang untuk digunakan sebagai pengeluaran. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa untuk menghapuskan kemiskinan, yang perlu dilakukan adalah memperbesar semua output industri di Thailand, sehingga nantinya akan memperbesar pendapatan dan mengangkat orang-orang miskin diatas garis kemiskinan.

Senada dengan penelitian Durongkaveroj tersebut, Quiggin dan Mahadevan (2015) meneliti tentang beban kemiskinan dalam menemukan pendekatan untuk menghapuskan kemiskinan itu sendiri. Penelitian ini juga menyetujui bahwa penggunaan *poverty gap* memang dapat digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis ukuran beban kemiskinan, sehingga dapat digunakan sebagai pendekatan dalam mengentaskan kemiskinan. Namun cara yang disarankan cukup berbeda dengan penelitian Durongkaveroj. Kajian ilmiah ini menyarankan pemerintah untuk menaikkan pajak setinggi-tingginya bagi setiap orang yang memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan, dan pajak tersebut akan digunakan untuk sarana prasarana publik yang nantinya membantu masyarakat miskin. Cara kedua adalah negara kaya memberikan bantuan kepada negara miskin. Tetapi kedua cara ini memiliki beban tersendiri, dimulai dari korupsi, biaya administrasi, kepentingan politik, tidak tepatnya sasaran, dan sebagainya. Pada akhirnya investasi menjadi harapan terakhir dalam penelitian ini untuk mengentaskan kemiskinan.

Subramanian (2008) melakukan penelitian tentang kemiskinan global, ketimpangan antar negara, dan bantuan internasional. Penelitian ini menggunakan analisis dekriptif, didukung data-data serta ide dalam banyak ilustrasi empiris.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa standar kemiskinan global dianggap tidak tepat karena PPP (*purchasing power parity*) tidak sepenuhnya bekerja dalam dunia keuangan antar negara. Selain itu, angka garis kemiskinan (*poverty line*) yang ditetapkan sebagai standar internasional dianggap terlalu besar yaitu 1.400 USD. Ketimpangan antara negara miskin dan negara maju sangat besar, bahkan total kelebihan pendapatan di 11 negara maju mampu menutupi *poverty gap* 3-5 negara miskin. Penentuan besarnya alokasi bantuan terhadap negara miskin diukur menggunakan pendekatan Foster-Greer-Thorbecke dengan beberapa syarat. Syarat tersebut diantaranya adalah jumlah transfer bantuan tidak melebihi anggaran yang dianggarkan, tidak ada negara yang menerima bantuan yang melebihi defisit kemiskinan, dan transfer bantuan selalu tidak negatif.

Milanovic (2002), sebagai peneliti di *World Bank*, mengkaji tentang perilaku melebih-lebihkan kesenjangan kemiskinan dan perhitungan kesenjangan kemiskinan. Studi ini menyatakan bahwa analisis kemiskinan menjadi tidak tepat jika dilakukan dalam unit konsumsi dan bukan dalam pengeluaran per kapita. Dalam menghitung dana untuk pengentasan kemiskinan, dibutuhkan akses data ke setiap individu-individu, karena salah satu cara untuk mengetahui besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan mencari tahu besarnya nilai kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*), nilai inilah yang mampu mencerminkan besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Boex *et al* (2006) mencari hubungan antara desentralisasi fiskal dalam menanggulangi kemiskinan dengan analisis deskriptif. Studi ini menjelaskan bahwa walaupun berbeda makna, konsep penanggulangan kemiskinan dan sistem

desentralisasi memiliki beberapa kesamaan. Dalam hal definisi untuk menjelaskan keduanya, selalu berubah dan bertambah seiring perkembangan zaman. Kedua, konsep penanggulangan dan desentralisasi sulit dikuantifikasi. Terakhir, keduanya sangat erat dengan pemberdayaan (*empowerment*), dimana desentralisasi adalah wujud pemberdayaan terhadap pemerintah daerah, sementara penanggulangan kemiskinan juga wujud pemberdayaan suatu kelompok masyarakat miskin.

Selanjutnya penelitian yang dipublikasikan pada saat konferensi IMF oleh Braun dan Grote (2000), memuat pertanyaan besar tentang apakah orang miskin dilayani dalam sistem desentralisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika desentralisasi diberikan proporsi yang semakin besar pada semua aspek (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan), maka akan mengubah baik buruknya pelayanan kepada masyarakat miskin, dan arah perubahan tersebut dipengaruhi oleh interaksi antar sistem administratif, fiskal, dan desentralisasi politik.

Paramita (2013) melakukan penelitian dengan metode OLS untuk mencari tahu pengaruh APBD terhadap anggaran pembangunan dan pengentasan kemiskinan pada kabupaten/kota provinsi Jawa tengah-Yogyakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otonomi daerah dan peningkatan belanja pemerintah melalui APBD, ternyata belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini, mencari penyebab utama mengapa belanja pemerintah dan otonomi daerah tidak berpengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan. Ini terjadi karena pada variabel alokasi dan variabel distribusi APBD, kebijakan yang dikeluarkan cenderung mengarah pada kepentingan belanja rutin birokrasi,

seperti membayar gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah, biaya perkantoran dan akomodasi perjalanan dinas. Sehingga pengalokasian anggaran untuk menanggulangi kemiskinan menjadi kurang efektif.

Penelitian Kusreni dan Suhab (2009) tentang kebijakan APBD dan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan variabel kapasitas fiskal, belanja modal, dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini menggunakan regresi data panel di 22 Kabupaten selama lima tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas fiskal (penerimaan umum bukan DAK, DPL, dan pendapatan lainnya) lebih mempengaruhi kesejahteraan masyarakat daripada belanja modal. Hasil penelitian ini kemudian dikembangkan oleh penelitian yang dilakukan Sasana (2012), tentang pengaruh belanja pemerintah daerah dan pendapatan perkapita terhadap IPM di semua kabupaten Jawa Tengah. Studi ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan ialah berjenis data sekunder yang berupa data *cross section* semua provinsi di Indonesia. Data yang digunakan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing provinsi, indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap*) provinsi, data garis kemiskinan (*poverty line*) di setiap provinsi, dan jumlah penduduk di 34 provinsi. Data ini diperoleh dari berbagai instansi diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Waktu yang dipilih dalam penelitian ialah tahun 2017.

3.2. Alat Analisis

Analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Alat ini merupakan teknik, alat, atau prosedur yang dipakai untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan. Data yang telah dikumpulkan perlu disajikan untuk memudahkan penyaji dan pihak lain agar lebih mudah dimengerti, cukup menarik, komunikatif, dan informatif. Analisis deskriptif data juga meliputi penyajian data dalam berbagai bentuk seperti penggunaan peta, grafik, warna, dan sebagainya.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui, apakah dengan menggunakan komponen-komponen dalam APBD saja (mengeluarkan dana bantuan langsung), tiap-tiap provinsi di Indonesia mampu mengatasi kemiskinan di daerah masing-masing secara langsung. Maksud menghapuskan kemiskinan dengan cara langsung adalah, Pemerintah Provinsi menggunakan sumber daya keuangan

provinsi untuk melakukan transfer tunai secara langsung kepada orang miskin, sehingga pendapatan mereka sama dengan garis kemiskinan. Untuk keperluan tersebut, dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa alat bantu, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) yang nantinya akan diformulasikan bersama garis kemiskinan (*poverty line*) dan jumlah penduduk sehingga besarnya kedalaman kemiskinan yang mencerminkan dana minimum yang dibutuhkan untuk menghapus kemiskinan dapat diukur. Selanjutnya menganalisis secara deskriptif, kemampuan masing-masing komponen APBD yang dipilih, dalam mengatasi kemiskinan di masing-masing provinsi, sehingga hasil tersebut akan dituangkan dalam peta yang menggambarkan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah provinsi dalam menghapuskan kemiskinan

3.2.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), adalah ukuran rasio antara rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, berarti semakin besar jarak garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran penduduk (BPS, 2005). Sumber data yang dipakai berasal dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dengan rumus penghitungan sebagai berikut (BPS, 2017):

$$P_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \left(\frac{G_k - Y_i}{G_k} \right)^a$$

Dimana:

P_a = Indeks Kedalaman Kemiskinan

G_k = Garis Kemiskinan

Y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2, \dots, n$), $Y_i < G_k$

$$\alpha = 1$$

N = Jumlah penduduk

Apabila $\alpha = 0$ maka akan diperoleh persentase penduduk miskin (P_0) (*Head Count Index*). Jika $\alpha = 1$ akan menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan (P_1), sedangkan $\alpha = 2$ akan menghasilkan indeks keparahan kemiskinan (P_2).

3.2.2. Biaya Minimal Penghapusan Kemiskinan

Dari indeks kedalaman kemiskinan, kita dapat mencari pendekatan solusi kemiskinan yang dimaksud, dengan mengembangkan formula tersebut. Hasil nilai yang didapat merupakan kalkulasi dari menghitung selisih antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk miskin, sehingga kita dapat memperkirakan besarnya dana yang diperlukan untuk menghapuskan kemiskinan (Khandker dan Haughton, 2009). Dana atau uang yang diperlukan dalam menghapuskan kemiskinan, akan diberikan secara langsung atau hibah sehingga menaikkan pendapatan maupun pengeluaran setara dengan garis kemiskinan, dan rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$P_b = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \left(\frac{G_k - Y_i}{G_k} \right)^{\alpha} \times N \times G_k = \sum_{i=1}^n (G_k - Y_i)^{\alpha}$$

Dimana:

P_b = Biaya Minimal Penghapusan Kemiskinan

G_k = Garis Kemiskinan

Y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i= 1,2, \dots, n$), $Y_i < G_k$

$\alpha = 1$

N = Jumlah penduduk

Namun ukuran ini masih belum realistis karena belum mempertimbangkan berbagai macam biaya operasional dan faktor-faktor penghambat, serta masih memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Walaupun demikian, ukuran tersebut memberikan informasi yang berguna mengenai skala minimum dari sumber keuangan yang diperlukan untuk menangani masalah kemiskinan. Sebagai ukuran pengentasan kemiskinan, tolak ukur ini cukup memadai jika banyak asumsi yang dipenuhi seperti transfer dana kemiskinan dilakukan dengan target sasaran yang tepat, pemerintah benar-benar tahu siapa yang miskin dan tidak miskin, anggaran keuangan daerah berjumlah cukup (tanpa memikirkan alokasi lain), dan sebagainya (Khandker dan Haughton, 2009: 70).

3.2.3. Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Komponen APBD yang dipilih sebagai pembanding dan cerminan kemampuan daerah tersebut dalam pengentasan kemiskinan diantaranya:

1. Pendapatan
2. Pendapatan Asli Daerah
3. Pajak Daerah
4. Retribusi Daerah
5. Dana Perimbangan

6. Dana Alokasi Khusus
7. Hibah
8. Belanja Hibah
9. Belanja Bantuan Sosial
10. Belanja Modal

Selanjutnya, setiap komponen APBD yang dipilih, nilainya akan dirasionalkan terhadap nilai kedalaman kemiskinan (P_b), dengan rumus sebagai berikut:

- I. $Y_{Pi} = \frac{Pi}{P_{bi}}$
- II. $Y_{PADi} = \frac{PADi}{P_{bi}}$
- III. $Y_{PDi} = \frac{PDi}{P_{bi}}$
- IV. $Y_{RDi} = \frac{RDi}{P_{bi}}$
- V. $Y_{Daper\ i} = \frac{Daper\ i}{P_{bi}}$
- VI. $Y_{DAKi} = \frac{DAKi}{P_{bi}}$
- VII. $Y_{Hi} = \frac{Hi}{P_{bi}}$
- VIII. $Y_{BHi} = \frac{BHi}{P_{bi}}$
- IX. $Y_{BBSi} = \frac{BBSi}{P_{bi}}$
- X. $Y_{BMi} = \frac{BMi}{P_{bi}}$

Dimana:

P_b = Besarnya Dana Untuk Menghapuskan Kemiskinan

i = Provinsi

Y_P = Kemampuan Pendapatan Provinsi Menghapus Kemiskinan

Y_{PAD} = Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Menghapus Kemiskinan

Y_{PD} = Kemampuan Pendapatan Daerah Provinsi Menghapus Kemiskinan

Y_{RD} = Kemampuan Retribusi Daerah Provinsi Menghapus Kemiskinan

Y_{Daper} = Kemampuan Dana Perimbangan Provinsi Menghapus Kemiskinan

Y_{DAK} = Kemampuan Dana Alokasi Khusus Provinsi Menghapus Kemiskinan

Y_H = Kemampuan Hibah Provinsi Menghapus Kemiskinan

Y_{BH} = Kemampuan Belanja Hibah Provinsi Menghapus Kemiskinan

Y_{BBS} = Kemampuan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Menghapus Kemiskinan

Y_{BM} = Kemampuan Belanja Modal Provinsi Menghapus Kemiskinan

P = Pendapatan dalam APBD Provinsi

PAD = Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Provinsi

PD = Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi

RD = Retribusi Daerah dalam APBD Provinsi

$Daper$ = Dana Perimbangan dalam APBD Provinsi

DAK = Dana Alokasi Khusus dalam APBD Provinsi

H = Hibah dalam APBD Provinsi

BH = Belanja Hibah dalam APBD Provinsi

BBS = Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi

BM = Belanja Modal dalam APBD Provinsi

Sehingga Y pada setiap komponen APBD akan memiliki nilai tertentu yang mencerminkan kemampuan suatu daerah (Provinsi), dalam menghapus kemiskinan di daerahnya dengan kriteria utama sebagai berikut:

- a. Jika $Y_x \geq 1$, maka Daerah/Provinsi tersebut mampu menghapus kemiskinan secara langsung, menggunakan sumber dana dari komponen APBD yang dipilih. Semakin besar angkanya, menunjukkan kemampuan yang semakin besar.
- b. Jika $Y_x < 1$, maka Daerah/Provinsi tersebut kurang mampu menghapus kemiskinan secara langsung, menggunakan sumber dana dari komponen APBD yang dipilih. Semakin kecil angkanya, menunjukkan ketidakmampuan yang semakin besar.

Setelah kriteria utama yang menilai mampu tidaknya keuangan setiap provinsi ditentukan, maka selanjutnya kemampuan tersebut dapat diklasifikasikan dalam level/kategori berdasarkan interval yang sudah ditentukan sebagai berikut:

- a. $0 - 0,5$ = Sangat Tidak Mampu
- b. $0,51 - 1$ = Tidak Mampu
- c. $1,1 - 2$ = Cukup Mampu
- d. $2,1 - 10$ = Mampu
- e. > 10 = Sangat Mampu.

3.2.4. Pemetaan

Pada rencana penelitian kali ini, peneliti bermaksud menampilkan peta wilayah Indonesia secara utuh, hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan hasil analisis setiap komponen APBD di 34 provinsi secara bersamaan. Karena ada 10 komponen APBD yang dipilih, maka dalam pembahasan akan menyajikan 10 peta

wilayah Indonesia ditambah 1 peta rangkuman peringkat kemampuan keuangan setiap provinsi, yang sudah dibatasi garis-garis provinsi. Peta kemiskinan dapat disusun setelah peneliti mengetahui hasil analisis mengenai kemampuan APBD masing-masing provinsi dalam menghapuskan kemiskinan. Untuk memetakan hasil analisis tersebut, data dalam bentuk angka tersebut akan diinformasikan dalam bentuk gradasi warna yang menginformasikan kemampuan keuangan untuk setiap komponen APBD yang dipilih terhadap penghapusan kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia.

3.3. Batasan Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian, untuk melihat suatu kebijakan bisa diterapkan dalam mengatasi kemiskinan adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap*). Batasan operasional (pengertian/ruang lingkup) yang dimaksud dalam variabel-variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibagi menjadi 3 bagian yang pertama anggaran pendapatan, yang besarnya ditentukan melalui Pendapatan Asli Daerah (pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan, dan penerimaan lain), Dana Perimbangan (meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum/khusus), dan Pendapatan lain-lain (hibah, dana penyesuaian, dana darurat, dan sebagainya). Kedua yaitu Belanja Daerah (belanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, Belanja Langsung, dsb.), dan komponen terakhir yaitu Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

(Pendapatan, Dana, maupun Belanja, yaitu Anggaran belanja, yang dipakai pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas, dan yang terakhir pembiayaan, seperti Silpa tahun sebelumnya, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Utang, dsb). Data diperoleh dari Kementrian Keuangan yang satuannya dinyatakan dalam rupiah (Rp), dan waktu pengamatan ialah tahun 2017. Berikut batasan operasional komponen-komponen APBD yang digunakan sebagai acuan analisis:

- a) Pendapatan (P): keseluruhan pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah, yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan Asli Daerah (PAD): pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha/perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- c) Pajak Daerah (PD): Pungutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua kategori yaitu pajak negara yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah dan pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
- d) Retribusi Daerah (RD): pungutan pemerintah daerah sebagai imbal balik atas kepentingan orang pribadi maupun badan tertentu yang sudah diberikan izin tertentu ataupun jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah.

- e) Dana Perimbangan (Daper): dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah yang dimaksud dalam pelaksanaan Desentralisasi.
- f) Dana Alokasi Khusus (DAK): dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
- g) Hibah (H): pemberian barang atau kucuran dana dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi tertentu secara langsung. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus. Bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- h) Belanja Hibah (BH): bantuan dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal, yang penggunaannya disepakati dalam perjanjian hibah daerah, sifatnya tidak mengikat/tidak secara terus menerus.
- i) Belanja Bantuan Sosial (BBS): belanja yang digunakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- j) Belanja Modal (BM): belanja yang digunakan untuk melakukan pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (tanah, peralatan dan mesin, jalan, bangunan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya).

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_a) merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Data ini sudah dalam bentuk indeks/rasio di 34 provinsi di Indonesia.
3. Biaya Minimum Penghapusan Kemiskinan (P_b) diperoleh dari pengembangan indeks kedalaman kemiskinan, memperlihatkan selisih antara garis kemiskinan dan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sehingga kita dapat memperkirakan besarnya dana yang diperlukan untuk menghapuskan kemiskinan. Data ini tersaji dalam satuan Rupiah (Rp) di semua Provinsi.
4. Jumlah Penduduk (N) yang digunakan adalah data penduduk keseluruhan (bukan hanya penduduk miskin) di masing-masing Provinsi, data ini tersaji dalam satuan jiwa atau orang.
5. Garis Kemiskinan (G_k) merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), kedua hal ini sudah memiliki rumus/cara perhitungan dan standar penentuan garis kemiskinan yang sudah ditetapkan oleh BPS Indonesia. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Data ini tersaji dalam satuan Rupiah (Rp) dan garis kemiskinannya berbeda-beda di setiap Provinsi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana kemampuan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan tahun 2017. Tahapan pertama adalah mencari besarnya dana yang dibutuhkan untuk menghapuskan kemiskinan, selanjutnya menganalisis kemampuan keuangan setiap provinsi dengan merasiokan setiap komponen APBD terhadap besarnya dana yang dibutuhkan untuk menghapuskan kemiskinan. Penyajian nilai kemampuan pada 34 provinsi, akan disajikan dalam bentuk tabel sebanyak 10 tabel sesuai banyaknya komponen APBD yang digunakan, dilanjutkan dengan menginformasikan kemampuan tersebut melalui skala/gradasi warna dalam bentuk peta 34 provinsi di Indonesia sebanyak 10 peta. Terakhir, akan ditampilkan peringkat dan peta kemampuan setiap provinsi dengan menggunakan keseluruhan APBD dalam menghapuskan kemiskinan. Proses pengolahan data menggunakan program Microsoft Excel dan pengolahan peta menggunakan Bing Maps.

4.1. Dana Untuk Menghapuskan Kemiskinan

Sebelum mencari nilai kemampuan setiap daerah menghapuskan kemiskinan, langkah pertama adalah mencari besarnya dana yang dibutuhkan untuk menghapuskan kemiskinan (Y_b). Dana yang dibutuhkan tersebut merupakan kalkulasi dari beberapa variabel, diantaranya indeks kedalaman kemiskinan (P_a), jumlah penduduk (N), dan garis kemiskinan (G_k) di setiap provinsi tahun 2017.

$$P_b = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \left(\frac{G_k - Y_i}{G_k} \right)^a \times N \times G_k = \sum_{i=1}^n (G_k - Y_i)^a$$

Hasil dari kalkulasi tersebut bisa dilihat pada Tabel 4.1. Dalam Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dana yang dibutuhkan untuk menghapuskan kemiskinan semua provinsi, memiliki angka kebutuhan dana yang sangat besar dimulai dari ratusan milyar sampai puluhan triliun.

Tabel 4.1
Besarnya Dana Yang Dibutuhkan Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	P_b (dalam Rupiah)	PROVINSI	P_b (dalam Rupiah)
ACEH	4.240.310.112.397	SULAWESI UTARA	648.723.290.575
SUMATERA UTARA	6.553.827.175.589	SULAWESI TENGAH	1.774.428.148.063
SUMATERA BARAT	1.242.856.666.510	SULAWESI SELATAN	2.808.340.613.760
RIAU	2.308.874.356.800	SULAWESI TENGGARA	930.708.179.275
JAMBI	1.161.267.565.480	BALI	882.084.701.517
SUMATERA SELATAN	4.020.372.718.560	NUSA TENGGARA BARAT	2.797.494.872.083
BENGKULU	1.554.780.380.700	NUSA TENGGARA TIMUR	4.835.378.479.225
LAMPUNG	3.907.738.498.727	MALUKU	1.438.991.707.167
DKI JAKARTA	2.251.715.444.253	PAPUA	6.260.656.632.533
JAWA BARAT	14.308.916.378.225	MALUKU UTARA	328.527.623.790
JAWA TENGAH	13.371.661.409.985	BANTEN	3.468.557.077.440
D.I YOGYAKARTA	1.660.693.855.590	KEP. BANGKA BELITUNG	326.972.431.648
JAWA TIMUR	16.474.181.647.770	GORONTALO	709.909.493.440
KALIMANTAN BARAT	275.082.961.214	KEP. RIAU	846.647.514.977
KALIMANTAN TENGAH	666.248.165.660	PAPUA BARAT	1.666.775.179.370
KALIMANTAN SELATAN	1.003.619.451.600	SULAWESI BARAT	475.635.070.300
KALIMANTAN TIMUR	1.443.466.566.533	KALIMANTAN UTARA	253.182.323.093

Sumber: Lampiran 2 (diolah)

Provinsi dengan kebutuhan dana terbesar untuk menghapuskan kemiskinan adalah Jawa Timur dengan nilai kurang lebih 16 triliun rupiah, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah berturut-turut sebesar kurang lebih 14 dan 13 triliun, sedangkan provinsi dengan kebutuhan dana terendah sebesar 253 milyar rupiah ada pada provinsi Kalimantan Utara. Rata-rata dana yang dibutuhkan 34 provinsi dalam menghapuskan kemiskinan sebesar kurang lebih 3 triliun rupiah.

4.2. Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Setelah besarnya dana yang dibutuhkan untuk menghapus kemiskinan diketahui, langkah selanjutnya adalah menganalisis kemampuan keuangan (Y) setiap provinsi (i) dengan merasiokan masing-masing komponen APBD terhadap besarnya dana yang dibutuhkan untuk menghapuskan kemiskinan (Yb), cara tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_i = \frac{\text{Komponen APBD}}{Yb}$$

4.2.1. Kemampuan Pendapatan Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.2
Kemampuan Pendapatan Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_p	PROVINSI	Y_p
ACEH	3,37	SULAWESI UTARA	5,48
SUMATERA UTARA	1,86	SULAWESI TENGAH	2,02
SUMATERA BARAT	4,92	SULAWESI SELATAN	3,17
RIAU	3,84	SULAWESI TENGGARA	3,81
JAMBI	3,59	BALI	7,05
SUMATERA SELATAN	2,04	NUSA TENGGARA BARAT	1,71
BENGKULU	1,96	NUSA TENGGARA TIMUR	0,98
LAMPUNG	1,72	MALUKU	1,99
DKI JAKARTA	27,74	PAPUA	2,23
JAWA BARAT	2,13	MALUKU UTARA	8,72
JAWA TENGAH	1,76	BANTEN	2,82
DI YOGYAKARTA	3,00	KEP. BANGKA BELITUNG	7,20
JAWA TIMUR	1,70	GORONTALO	2,58
KALIMANTAN BARAT	4,00	KEP. RIAU	3,78
KALIMANTAN TENGAH	6,13	PAPUA BARAT	4,13
KALIMANTAN SELATAN	5,48	SULAWESI BARAT	3,81
KALIMANTAN TIMUR	5,61	KALIMANTAN UTARA	9,22

Sumber: Lampiran 3 (diolah)

Dalam Tabel 4.2 yang menyajikan ukuran kemampuan Pendapatan APBD dalam menghapuskan kemiskinan, dapat dilihat bahwa rata-rata 34 provinsi

(dengan nilai 4,46) jika menggunakan seluruh Pendapatan dalam APBD, untuk diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin, masuk kedalam kategori mampu menghapuskan kemiskinan itu sendiri. Provinsi dengan level sangat mampu menghapuskan kemiskinan melalui pendapatan hanyalah DKI Jakarta dengan nilai 27,7, disusul Kalimantan Utara dan Maluku Utara pada level mampu sebesar 9,2 dan 8,7, sedangkan provinsi dengan nilai terendah sebesar 0,9 ada pada Nusa Tenggara Timur dan sebagai satu-satunya provinsi yang tidak mampu menggunakan Pendapatan untuk menghapuskan kemiskinan secara langsung.

4.2.2 Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.3
Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_{PAD}	PROVINSI	Y_{PAD}
ACEH	0,53	SULAWESI UTARA	1,66
SUMATERA UTARA	0,75	SULAWESI TENGAH	0,52
SUMATERA BARAT	1,65	SULAWESI SELATAN	1,33
RIAU	1,62	SULAWESI TENGGARA	0,80
JAMBI	1,20	BALI	3,69
SUMATERA SELATAN	0,75	NUSA TENGGARA BARAT	0,54
BENGKULU	0,58	NUSA TENGGARA TIMUR	0,21
LAMPUNG	0,68	MALUKU	0,36
DKI JAKARTA	18,43	PAPUA	0,21
JAWA BARAT	1,15	MALUKU UTARA	1,48
JAWA TENGAH	0,89	BANTEN	1,63
DI YOGYAKARTA	1,00	KEP. BANGKA BELITUNG	2,08
JAWA TIMUR	0,90	GORONTALO	0,50
KALIMANTAN BARAT	1,31	KEP. RIAU	1,30
KALIMANTAN TENGAH	1,99	PAPUA BARAT	0,24
KALIMANTAN SELATAN	3,19	SULAWESI BARAT	0,63
KALIMANTAN TIMUR	2,76	KALIMANTAN UTARA	1,66

Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Pada Tabel 4.3 komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan dalam menghapuskan kemiskinan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil menunjukkan bahwa terdapat 5 provinsi pada kategori sangat tidak mampu, 11 provinsi tidak mampu, 14 provinsi cukup mampu, 3 provinsi mampu, dan 1 provinsi sangat mampu menghapuskan kemiskinan, dengan menggunakan PAD yang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin. Provinsi yang sangat mampu menghapuskan kemiskinan hanya dipegang oleh DKI Jakarta dengan nilai 18,4, diikuti 3 provinsi mampu yaitu Bali sebesar 3,6, Kalimantan Selatan sebesar 3,1, dan Kalimantan Timur sebesar 2,7. Dua provinsi teratas pada kategori cukup mampu adalah Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah dengan nilai berturut-turut 1,9 dan 2,08. Dua Provinsi teratas pada kategori tidak mampu menghapuskan kemiskinan adalah Jawa timur sebesar 0,9 dan Jawa Tengah sebesar 0,89.

Sedangkan provinsi dengan nilai kemampuan terendah sebesar 0,21 masih berada pada Nusa Tenggara Timur bersamaan dengan provinsi Papua, sehingga masuk sebagai provinsi yang sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan. Tiga provinsi lain yang termasuk dalam kategori sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan adalah Papua Barat (0,24), Maluku (0,36) dan Gorontalo (0,5). Rata-rata nilai kemampuan 34 provinsi sebesar 1,71 yang berarti secara keseluruhan, penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung untuk menghapuskan kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam level cukup mampu menghapuskan kemiskinan.

4.2.3 Kemampuan Pajak Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.4
Kemampuan Pajak Daerah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_{PD}	PROVINSI	Y_{PD}
ACEH	0,31	SULAWESI UTARA	1,40
SUMATERA UTARA	0,68	SULAWESI TENGAH	0,44
SUMATERA BARAT	1,23	SULAWESI SELATAN	1,18
RIAU	1,30	SULAWESI TENGGARA	0,67
JAMBI	1,02	BALI	3,29
SUMATERA SELATAN	0,70	NUSA TENGGARA BARAT	0,40
BENGKULU	0,42	NUSA TENGGARA TIMUR	0,16
LAMPUNG	0,61	MALUKU	0,23
DKI JAKARTA	15,65	PAPUA	0,16
JAWA BARAT	1,06	MALUKU UTARA	1,11
JAWA TENGAH	0,76	BANTEN	1,57
DI YOGYAKARTA	0,87	KEP. BANGKA BELITUNG	1,70
JAWA TIMUR	0,74	GORONTALO	0,46
KALIMANTAN BARAT	1,13	KEP. RIAU	1,18
KALIMANTAN TENGAH	1,63	PAPUA BARAT	0,16
KALIMANTAN SELATAN	2,68	SULAWESI BARAT	0,53
KALIMANTAN TIMUR	2,10	KALIMANTAN UTARA	1,16

Sumber: Lampiran 5 (diolah)

Kemampuan Pajak Daerah menghapuskan kemiskinan disajikan dalam Tabel 4.4. Rata-rata kemampuan Pajak Daerah 34 provinsi dalam menghapuskan kemiskinan sebesar 1,43 yang berarti secara keseluruhan, kemampuan Pajak Daerah berada pada level cukup mampu untuk menghapuskan kemiskinan. Tetapi untuk level setiap provinsi cukup beragam, sebanyak 1 provinsi berada pada level sangat mampu, 3 provinsi mampu, 11 provinsi cukup mampu, 10 provinsi tidak mampu, dan 9 provinsi sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan. Daerah dengan nilai tertinggi ada pada DKI Jakarta sebesar 15,6, diikuti Bali sebesar 3,2 dan Kalimantan Selatan sebesar 2,6. Papua Barat menjadi provinsi dengan nilai kemampuan terendah yaitu sebesar 0,16.

4.2.4 Kemampuan Retribusi Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.5
Kemampuan Retribusi Daerah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_{RD}	PROVINSI	Y_{RD}
ACEH	0,00	SULAWESI UTARA	0,11
SUMATERA UTARA	0,01	SULAWESI TENGAH	0,00
SUMATERA BARAT	0,02	SULAWESI SELATAN	0,03
RIAU	0,01	SULAWESI TENGGARA	0,01
JAMBI	0,02	BALI	0,06
SUMATERA SELATAN	0,00	NUSA TENGGARA BARAT	0,01
BENGKULU	0,01	NUSA TENGGARA TIMUR	0,01
LAMPUNG	0,00	MALUKU	0,06
DKI JAKARTA	0,30	PAPUA	0,01
JAWA BARAT	0,00	MALUKU UTARA	0,20
JAWA TENGAH	0,01	BANTEN	0,01
DI YOGYAKARTA	0,02	KEP. BANGKA BELITUNG	0,05
JAWA TIMUR	0,01	GORONTALO	0,01
KALIMANTAN BARAT	0,03	KEP. RIAU	0,01
KALIMANTAN TENGAH	0,01	PAPUA BARAT	0,00
KALIMANTAN SELATAN	0,03	SULAWESI BARAT	0,04
KALIMANTAN TIMUR	0,02	KALIMANTAN UTARA	0,00

Sumber: Lampiran 6 (diolah)

Kemampuan Retribusi Daerah dalam menghapuskan kemiskinan disajikan dalam Tabel 4.5. Secara keseluruhan, provinsi di Indonesia sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan menggunakan dana Retribusi Daerah. Ini karena rata-rata nilai kemampuan Retribusi Daerah sebesar 0,03. Rata-rata yang mengindikasikan ketidakmampuan ini terbentuk karena semua provinsi berada pada level yang sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan. Provinsi dengan nilai kemampuan tinggi dalam komponen ini diantaranya DKI Jakarta (0,3), Maluku Utara (0,2) dan Sulawesi Utara (0,1), namun tetap masuk sebagai provinsi yang sangat tidak mampu. Provinsi dengan nilai kemampuan terendah adalah Papua Barat dan Kalimantan Utara dengan nilai 0,00.

4.2.5 Kemampuan Dana Perimbangan Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.6
Kemampuan Dana Perimbangan Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_{Daper}	PROVINSI	Y_{Daper}
ACEH	0,88	SULAWESI UTARA	3,74
SUMATERA UTARA	1,10	SULAWESI TENGAH	1,49
SUMATERA BARAT	3,21	SULAWESI SELATAN	1,84
RIAU	2,22	SULAWESI TENGGARA	2,95
JAMBI	2,38	BALI	3,03
SUMATERA SELATAN	1,29	NUSA TENGGARA BARAT	1,15
BENGKULU	1,37	NUSA TENGGARA TIMUR	0,77
LAMPUNG	1,03	MALUKU	1,62
DKI JAKARTA	8,34	PAPUA	0,71
JAWA BARAT	0,98	MALUKU UTARA	5,81
JAWA TENGAH	0,85	BANTEN	1,19
DI YOGYAKARTA	1,48	KEP. BANGKA BELITUNG	5,10
JAWA TIMUR	0,79	GORONTALO	2,07
KALIMANTAN BARAT	2,68	KEP. RIAU	2,48
KALIMANTAN TENGAH	3,93	PAPUA BARAT	1,92
KALIMANTAN SELATAN	2,25	SULAWESI BARAT	3,18
KALIMANTAN TIMUR	2,83	KALIMANTAN UTARA	7,11

Sumber: Lampiran 7 (diolah)

Dalam Tabel 4.6 yang menyajikan nilai kemampuan Dana Perimbangan dalam menghapuskan kemiskinan, dapat dilihat bahwa rata-rata semua provinsi bernilai 2,46, sehingga bisa dikatakan mampu menghapuskan kemiskinan menggunakan Dana Perimbangan, yang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin. Terdapat 17 provinsi yang berada pada level mampu, 10 provinsi cukup mampu, dan 7 provinsi yang tidak mampu menghapuskan kemiskinan menggunakan dana perimbangan dalam APBD. Provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi adalah DKI Jakarta (8,3), disusul Kalimantan Utara sebesar 7,1 dan Maluku Utara sebesar 5,8 sedangkan provinsi dengan nilai kemampuan terendah sebesar 0,71 dimiliki oleh Papua diikuti NTT sebesar 0,77 dan provinsi Jawa timur sebesar 0,79.

4.2.6 Kemampuan Dana Alokasi Khusus Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.7
Kemampuan Dana Alokasi Khusus Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_{DAK}	PROVINSI	Y_{DAK}
ACEH	0,37	SULAWESI UTARA	1,53
SUMATERA UTARA	0,61	SULAWESI TENGAH	0,55
SUMATERA BARAT	1,42	SULAWESI SELATAN	0,92
RIAU	0,73	SULAWESI TENGGARA	1,13
JAMBI	0,83	BALI	1,31
SUMATERA SELATAN	0,50	NUSA TENGGARA BARAT	0,49
BENGKULU	0,45	NUSA TENGGARA TIMUR	0,38
LAMPUNG	0,49	MALUKU	0,54
DKI JAKARTA	1,40	PAPUA	0,20
JAWA BARAT	0,65	MALUKU UTARA	1,77
JAWA TENGAH	0,50	BANTEN	0,69
DI YOGYAKARTA	0,57	KEP. BANGKA BELITUNG	1,39
JAWA TIMUR	0,44	GORONTALO	0,58
KALIMANTAN BARAT	1,19	KEP. RIAU	0,65
KALIMANTAN TENGAH	1,04	PAPUA BARAT	0,25
KALIMANTAN SELATAN	0,75	SULAWESI BARAT	1,07
KALIMANTAN TIMUR	0,79	KALIMANTAN UTARA	1,22

Sumber: Lampiran 8 (diolah)

Kemampuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam menghapus kemiskinan disajikan dalam Tabel 4.7. Secara umum dilihat dari nilai rata-rata sebesar 0,81, kemungkinan penggunaan DAK oleh seluruh provinsi untuk menghapus kemiskinan sulit terjadi. Terdapat 3 level yang menggambarkan kemampuan secara keseluruhan, pertama level cukup mampu dimiliki 8 provinsi, 14 provinsi di level tidak mampu, dan 10 provinsi yang sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan. Berbeda dengan sebelumnya, provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi ada pada Maluku Utara sebesar 1,7, DKI Jakarta (1,4), dan Kep. Bangka Belitung (1,3). Nilai kemampuan terendah berada pada provinsi Papua (0,2).

4.2.7 Kemampuan Hibah Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.8
Kemampuan Hibah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_H	PROVINSI	Y_H
ACEH	0,00	SULAWESI UTARA	0,00
SUMATERA UTARA	0,00	SULAWESI TENGAH	0,01
SUMATERA BARAT	0,02	SULAWESI SELATAN	0,00
RIAU	0,00	SULAWESI TENGGARA	0,00
JAMBI	0,00	BALI	0,01
SUMATERA SELATAN	0,00	NUSA TENGGARA BARAT	0,00
BENGKULU	0,00	NUSA TENGGARA TIMUR	0,00
LAMPUNG	0,00	MALUKU	0,00
DKI JAKARTA	0,98	PAPUA	0,00
JAWA BARAT	0,00	MALUKU UTARA	0,83
JAWA TENGAH	0,00	BANTEN	0,00
DI YOGYAKARTA	0,01	KEP. BANGKA BELITUNG	0,00
JAWA TIMUR	0,00	GORONTALO	0,00
KALIMANTAN BARAT	0,00	KEP. RIAU	0,00
KALIMANTAN TENGAH	0,00	PAPUA BARAT	0,00
KALIMANTAN SELATAN	0,03	SULAWESI BARAT	0,00
KALIMANTAN TIMUR	0,01	KALIMANTAN UTARA	0,00

Sumber: Lampiran 9 (diolah)

Dalam Tabel 4.8 yang menyajikan nilai kemampuan Hibah dalam menghapuskan kemiskinan, dapat dilihat bahwa rata-rata semua provinsi bernilai 0,06, sehingga dapat dikategorikan sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan, menggunakan Hibah secara langsung kepada masyarakat miskin. Terdapat 2 provinsi yang tidak mampu, sisanya 32 provinsi berada pada level sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan, bahkan 11 diantaranya bernilai 0. Dua provinsi dengan nilai tertinggi adalah DKI Jakarta (0,9) dan Maluku Utara (0,8), sedangkan 13 provinsi yang sama sekali tidak memiliki kemampuan karena bernilai 0 adalah Sumsel, Bengkulu, Jatim, Kalbar, Kalteng, Sulut, Sulteng, Maluku, Papua, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Sulbar, dan Papua Barat.

4.2.8 Kemampuan Belanja Hibah Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.9
Kemampuan Belanja Hibah Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_{BH}	PROVINSI	Y_{BH}
ACEH	0,16	SULAWESI UTARA	0,81
SUMATERA UTARA	0,56	SULAWESI TENGAH	0,34
SUMATERA BARAT	0,88	SULAWESI SELATAN	0,68
RIAU	0,44	SULAWESI TENGGARA	0,76
JAMBI	0,56	BALI	1,22
SUMATERA SELATAN	0,41	NUSA TENGGARA BARAT	0,35
BENGKULU	0,25	NUSA TENGGARA TIMUR	0,28
LAMPUNG	0,39	MALUKU	0,34
DKI JAKARTA	0,65	PAPUA	0,17
JAWA BARAT	0,73	MALUKU UTARA	1,02
JAWA TENGAH	0,37	BANTEN	0,69
DI YOGYAKARTA	0,43	KEP. BANGKA BELITUNG	0,95
JAWA TIMUR	0,39	GORONTALO	0,42
KALIMANTAN BARAT	0,67	KEP. RIAU	0,45
KALIMANTAN TENGAH	0,66	PAPUA BARAT	0,45
KALIMANTAN SELATAN	0,55	SULAWESI BARAT	0,74
KALIMANTAN TIMUR	0,60	KALIMANTAN UTARA	0,90

Sumber: Lampiran 10 (diolah)

Pada Tabel 4.9 komponen yang digunakan dalam menghapuskan kemiskinan adalah Belanja Hibah. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata nilai kemampuan Belanja Hibah 34 provinsi adalah 0,57. Sehingga, penggunaan Belanja Hibah secara langsung kepada masyarakat miskin, untuk menghapuskan kemiskinan bisa dianggap tidak mampu. Terdapat 1 provinsi yang dikategorikan cukup mampu, 17 provinsi tidak mampu, dan 16 provinsi yang sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan dengan menggunakan Belanja Hibah. Provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi adalah Bali sebesar 1,2 lalu provinsi Maluku sebesar 1,02, sedangkan nilai kemampuan terendah sebesar 0,16 dimiliki provinsi Aceh diikuti provinsi Papua sebesar 0,17.

4.2.9 Kemampuan Belanja Bantuan Sosial Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.10
Kemampuan Belanja Bantuan Sosial Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_{BBS}	PROVINSI	Y_{BBS}
ACEH	0,05	SULAWESI UTARA	0,00
SUMATERA UTARA	0,00	SULAWESI TENGAH	0,00
SUMATERA BARAT	0,00	SULAWESI SELATAN	0,00
RIAU	0,00	SULAWESI TENGGARA	0,00
JAMBI	0,00	BALI	0,01
SUMATERA SELATAN	0,00	NUSA TENGGARA BARAT	0,01
BENGKULU	0,00	NUSA TENGGARA TIMUR	0,00
LAMPUNG	0,00	MALUKU	0,01
DKI JAKARTA	1,11	PAPUA	0,01
JAWA BARAT	0,00	MALUKU UTARA	0,02
JAWA TENGAH	0,02	BANTEN	0,04
DI YOGYAKARTA	0,00	KEP. BANGKA BELITUNG	0,00
JAWA TIMUR	0,00	GORONTALO	0,00
KALIMANTAN BARAT	0,00	KEP. RIAU	0,01
KALIMANTAN TENGAH	0,06	PAPUA BARAT	0,03
KALIMANTAN SELATAN	0,00	SULAWESI BARAT	0,04
KALIMANTAN TIMUR	0,00	KALIMANTAN UTARA	0,02

Sumber: Lampiran 11 (diolah)

Dalam Tabel 4.10 yang menyajikan nilai kemampuan Belanja Bantuan Sosial (BBS) dalam menghapuskan kemiskinan, rata-rata nilai kemampuan semua provinsi bernilai 0,04, sehingga dapat dikategorikan sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan menggunakan BBS. Hanya ada 1 provinsi cukup mampu, yakni DKI Jakarta dengan nilai 1,11, sisanya 33 provinsi berada pada level sangat tidak mampu menghapuskan kemiskinan, bahkan 6 diantaranya bernilai 0. Enam provinsi yang sama sekali tidak memiliki kemampuan karena tidak memiliki anggaran adalah Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kalsel, dan Sulteng.

4.2.10 Kemampuan Belanja Modal Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.11
Kemampuan Belanja Modal Masing-Masing Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

PROVINSI	Y_{BM}	PROVINSI	Y_{BM}
ACEH	0,60	SULAWESI UTARA	1,07
SUMATERA UTARA	0,27	SULAWESI TENGAH	0,27
SUMATERA BARAT	0,76	SULAWESI SELATAN	0,38
RIAU	1,10	SULAWESI TENGGARA	0,83
JAMBI	0,87	BALI	0,80
SUMATERA SELATAN	0,44	NUSA TENGGARA BARAT	0,35
BENGKULU	0,65	NUSA TENGGARA TIMUR	0,12
LAMPUNG	0,29	MALUKU	0,41
DKI JAKARTA	7,05	PAPUA	0,56
JAWA BARAT	0,16	MALUKU UTARA	2,10
JAWA TENGAH	0,14	BANTEN	0,44
DI YOGYAKARTA	0,63	KEP. BANGKA BELITUNG	1,37
JAWA TIMUR	0,16	GORONTALO	0,41
KALIMANTAN BARAT	0,74	KEP. RIAU	0,69
KALIMANTAN TENGAH	0,88	PAPUA BARAT	0,62
KALIMANTAN SELATAN	1,00	SULAWESI BARAT	1,14
KALIMANTAN TIMUR	0,64	KALIMANTAN UTARA	3,76

Sumber: Lampiran 12 (diolah)

Kemampuan Belanja Modal untuk menghapuskan kemiskinan disajikan dalam Tabel 4.11. Rata-rata kemampuan Belanja Modal seluruh provinsi dalam menghapuskan kemiskinan sebesar 0,93 yang berarti secara keseluruhan, kemampuan Belanja Modal berada pada level tidak mampu untuk menghapuskan kemiskinan. Sebanyak 3 provinsi berada pada level mampu, 3 provinsi cukup mampu, 15 provinsi tidak mampu, dan 13 provinsi sangat tidak mampu. Daerah dengan nilai kemampuan tertinggi ada pada DKI Jakarta sebesar 7,05, diikuti Kalimantan Utara sebesar 3,76 dan Maluku Utara sebesar 2,1. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan nilai kemampuan paling rendah yaitu sebesar 0,12 diikuti Jawa tengah (0,14), Jawa Barat dan Jawa Timur bersamaan (0,16).

4.3. Peta Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

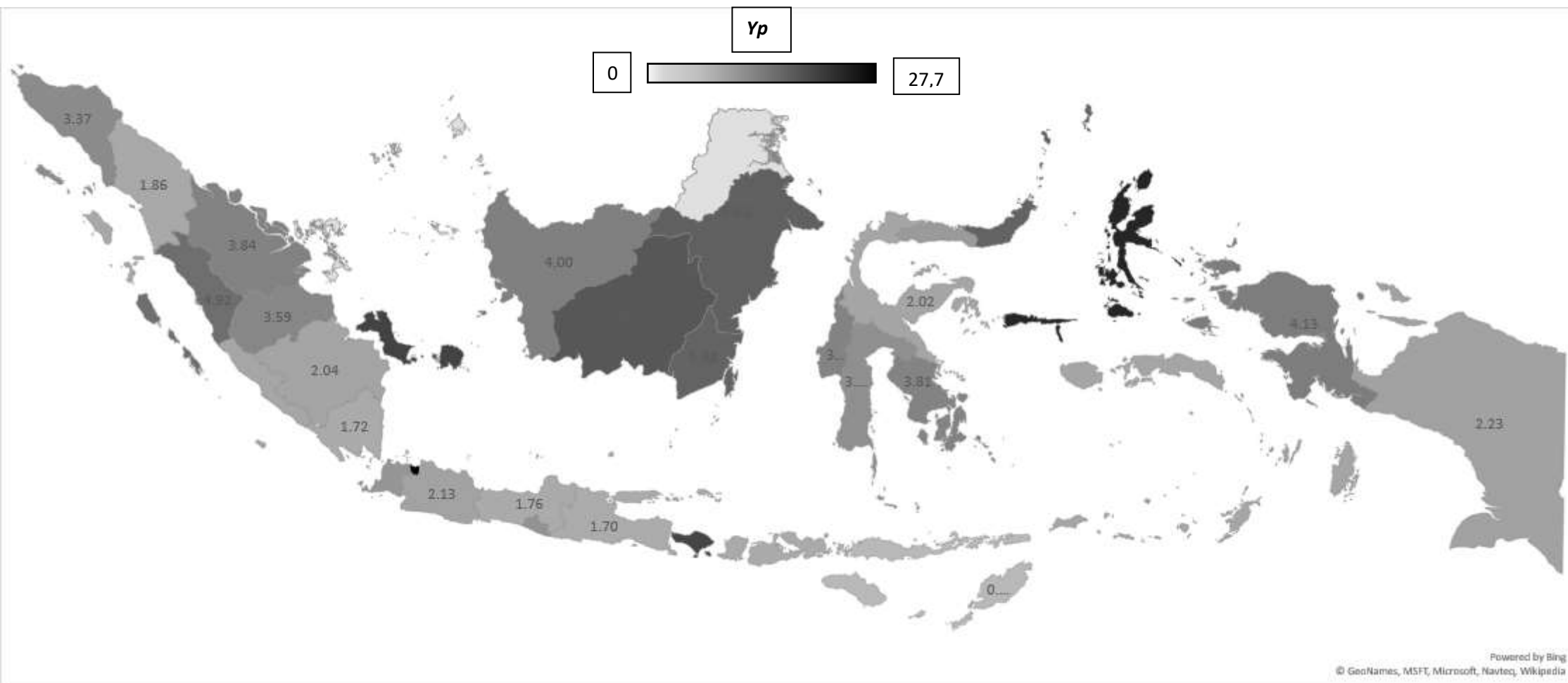
Setelah nilai kemampuan keuangan setiap pemerintah provinsi untuk menghapus kemiskinan diketahui, langkah selanjutnya adalah memetakan kemampuan keuangan provinsi tersebut berdasarkan setiap komponen APBD. Pada pemetaan kemampuan tersebut, peneliti bermaksud menampilkan peta wilayah Indonesia secara utuh yaitu 34 provinsi, hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan hasil analisis setiap komponen APBD di 34 provinsi secara bersamaan, sehingga setiap pembaca yang melihat peta dimungkinkan untuk dapat langsung membandingkan kemampuan keuangan suatu daerah dengan daerah lain dalam menghapuskan kemiskinan.

Karena ada 10 komponen APBD yang dipilih, maka dalam pembahasan akan menyajikan 10 peta wilayah Indonesia ditambah 1 peta rangkuman peringkat kemampuan keuangan setiap provinsi, yang sudah dibatasi garis-garis provinsi. Untuk memetakan nilai kemampuan tersebut, beberapa provinsi akan dicantumkan nilai kemampuan di dalam wilayahnya dan yang terpenting nilai kemampuan tersebut akan diinformasikan dalam bentuk gradasi berbagai warna, dimana 1 warna untuk 1 komponen APBD. Gradasi suatu warna akan menginformasikan nilai kemampuan, dimana gradasi tersebut dimulai dari warna putih menuju warna yang dipilih dan semakin pekat/gelap. Semakin pekat/gelap warna peta maka semakin mampu keuangan pemerintah provinsi tersebut dalam menghapuskan kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia dan sebaliknya.

4.3.1 Peta Kemampuan Pendapatan Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Pada Gambar 4.1 disajikan peta dengan pilihan warna hitam yang merupakan cerminan dari kemampuan pendapatan di setiap provinsi di Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Dalam gambar tersebut, nilai kemampuan terkecil yaitu 0 dimulai dengan warna putih, semakin naik nilai kemampuannya mendekati 14 warnanya akan semakin mengarah menjadi abu-abu, dan sampai pada nilai kemampuan tertinggi yaitu 27,7, warna pada peta akan menjadi hitam pekat. DKI Jakarta, provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi bisa dilihat sebagai provinsi dengan warna paling hitam di antara semua provinsi, dan provinsi dengan nilai kemampuan terendah adalah Nusa Tenggara Timur, yang pada peta di Gambar 4.1 merupakan provinsi dengan warna paling cerah dibandingkan dengan provinsi seluruhnya.

Peta pada Gambar 4.1 yang menginformasikan kemampuan pendapatan tersebut, warna persebarannya tidak tersegmentasi pada wilayah tertentu. Wilayah barat tidak seluruhnya berwarna abu-abu maupun hitam, beberapa provinsi saja seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Kep. Riau. Wilayah Indonesia bagian tengah banyak yang berwarna abu-abu, beberapa yang hitam seperti Bali dan Kalimantan Utara. Wilayah timur yang berwarna hitam ada di Maluku Utara dan sekitarnya, provinsi lain pada umumnya berwarna abu-abu. Berdasarkan luas wilayah, pada umumnya provinsi yang berwarna hitam pekat dan berwarna abu-abu terang adalah provinsi dengan luas wilayah yang cenderung kecil, seperti DKI Jakarta, Bali, NTT, dan Maluku Utara. Tidak ada perbedaan yang sangat terlihat antara provinsi di Jawa dan di luar Jawa, serta provinsi-provinsi di perbatasan.



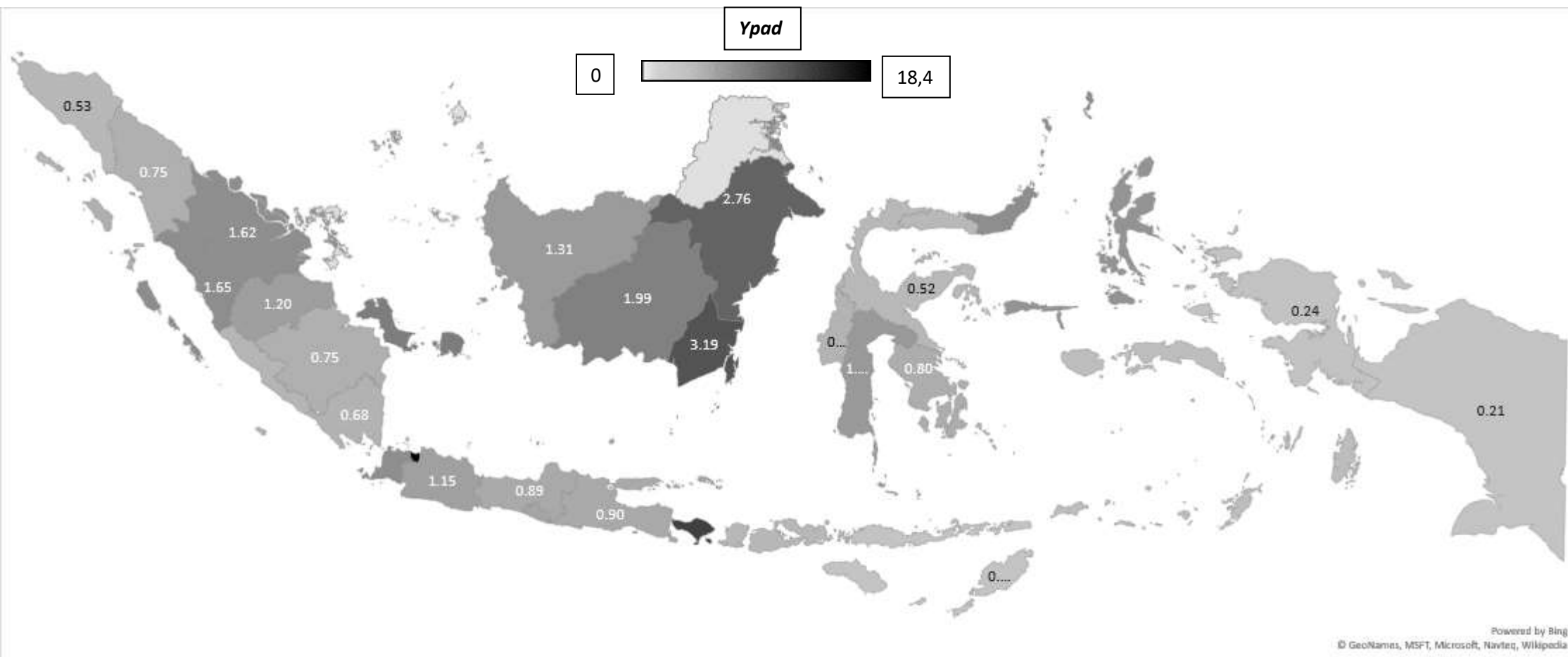
Gambar 4.1
Peta Kemampuan Pendapatan 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

4.3.2 Peta Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menghapuskan

Kemiskinan

Gambar 4.2 menampilkan peta dengan warna hitam yang menginformasikan kemampuan pendapatan asli daerah di 34 provinsi di Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Peta pada Gambar tersebut, nilai 0 sebagai kemampuan terkecil ditandai dengan warna putih, semakin naik nilai kemampuannya warnanya akan semakin menjadi abu-abu, dan sampai pada nilai kemampuan tertinggi yaitu 18,4, warna pada peta akan menjadi hitam pekat. Provinsi dengan nilai kemampuan terendah adalah Nusa Tenggara Timur, yang di Gambar 4.2 merupakan provinsi dengan warna paling cerah dibandingkan dengan provinsi seluruhnya dan masih provinsi yang sama, DKI Jakarta sebagai provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi bisa dilihat sebagai provinsi dengan warna paling hitam di antara semua provinsi.

Gambar 4.2 yang menginformasikan nilai kemampuan melalui warna, persebaran warnanya tersegmentasi pada wilayah Indonesia bagian tengah. Wilayah barat hampir seluruhnya berwarna abu-abu, yang sangat hitam hanya DKI Jakarta dan yang cukup hitam seperti Sumatera Barat. Wilayah Indonesia bagian tengah banyak yang berwarna gelap seperti Bali dan keseluruhan Kalimantan, sedangkan wilayah timur pada umumnya berwarna abu-abu terang. Berdasarkan luas wilayah, tidak ada perbedaan yang jelas antara gradasi warna di provinsi yang wilayahnya luas dan yang tidak. Begitupun dengan pola sebaran gradasi warna provinsi di Jawa dan di luar Jawa, serta provinsi-provinsi di perbatasan dengan negara lain, hampir tidak bisa dibedakan.

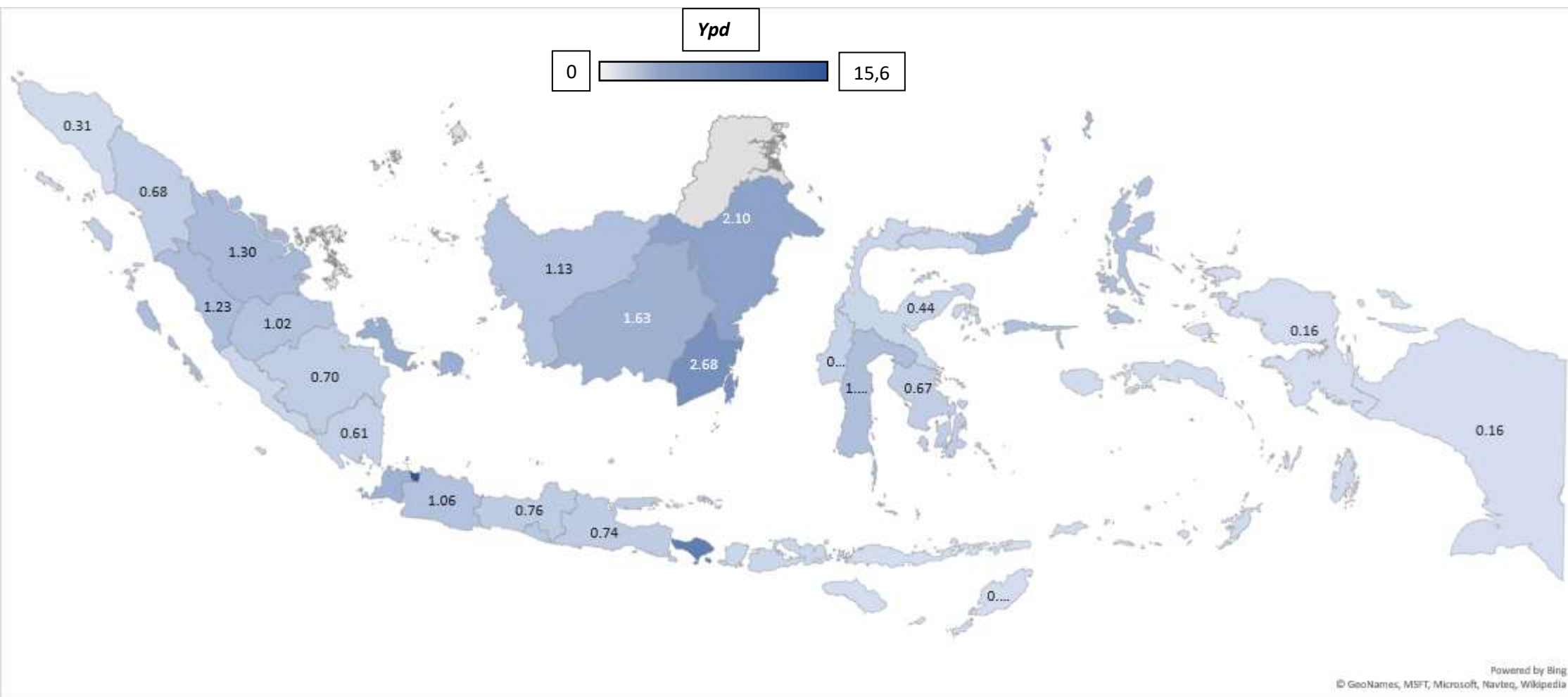


Gambar 4.2
Peta Kemampuan Pendapatan Asli Daerah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

4.3.3 Peta Kemampuan Pajak Daerah Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Gambar 4.3 adalah peta yang menginformasikan kemampuan pajak daerah di 34 provinsi di Indonesia, dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung melalui pewarnaan peta dengan gradasi biru. Skala pewarnaan pada peta tersebut mengikuti nilai kemampuan yang sudah diolah, dimulai dari nilai 0 sebagai kemampuan terkecil ditandai dengan warna putih. Semakin naik nilai kemampuannya warnanya akan menjadi biru muda, dan sampai pada nilai kemampuan tertinggi yaitu 15,6, warna pada peta akan menjadi biru tua. Provinsi dengan nilai kemampuan terendah adalah Papua Barat, yang merupakan provinsi dengan warna biru yang paling cerah dibandingkan dengan provinsi seluruhnya dan provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi yaitu DKI Jakarta, bisa dilihat sebagai provinsi dengan warna biru paling tua/pekat di antara semua provinsi.

Persebaran warna pada peta di Gambar 4.3 yang menginformasikan nilai kemampuan tidak tersegmentasi pada wilayah tertentu di Indonesia. Ini terjadi karena rata-rata nilai kemampuan hanya sebesar 1,43, sehingga banyak provinsi akan memiliki warna yang tidak berbeda jauh dengan warna provinsi lainnya. Wilayah barat hampir seluruhnya berwarna biru muda, yang sedikit terlihat biru tua hanya Riau dan tentu yang berwarna biru tua adalah Jakarta. Wilayah Indonesia bagian tengah yang warnanya pekat/tua adalah Bali dan Kalimantan Selatan, sedangkan wilayah timur pada umumnya berwarna biru terang. Tidak ada perbedaan yang jelas antara gradasi warna di provinsi yang wilayahnya luas dan yang tidak, begitupun dengan pola sebaran gradasi warna provinsi di Jawa dan di luar Jawa, serta provinsi-provinsi di perbatasan.



Gambar 4.3
Peta Kemampuan Pajak Daerah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskina

4.3.4 Peta Kemampuan Retribusi Daerah Dalam Menghapuskan

Kemiskinan

Peta di Gambar 4.4 dengan pewarnaan gradasi biru, adalah gambar yang menginformasikan kemampuan retribusi daerah setiap provinsi di Indonesia, dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Gradasi pewarnaan pada peta tersebut mengikuti besar kecilnya nilai kemampuan, dimulai dari warna biru terang sebagai nilai kemampuan terkecil yaitu 0, dan semakin berwarna biru tua jika nilai kemampuannya semakin meningkat, diakhiri dengan warna biru gelap pada nilai kemampuan tertinggi. Provinsi dengan warna biru paling gelap adalah DKI Jakarta dengan nilai kemampuan tertinggi sebesar 0,3 dan nilai kemampuan terendah adalah Papua Barat sebesar 0,0, yang merupakan provinsi dengan warna biru yang paling cerah.

Hampir semua persebaran warna pada peta di Gambar 4.4 yang menginformasikan nilai kemampuan, tidak terlalu menonjolkan perbedaan nilai kemampuan antar provinsi di Indonesia. Ini terjadi karena rata-rata nilai kemampuan hanya sebesar 0,03, dimana nilai kemampuan tertinggi hanya 0,3 (jarak pendek dan monoton), sehingga banyak provinsi akan memiliki warna biru cerah yang tidak berbeda jauh dengan warna provinsi lainnya. Di wilayah timur Indonesia, hanya Maluku dan sekitarnya yang sedikit berwarna lebih gelap. Di wilayah bagian tengah, tidak ada satupun provinsi yang sangat menonjol perbedaan warnanya. Wilayah barat hampir seluruhnya berwarna biru cerah, kecuali DKI Jakarta dengan nilai tertinggi. Tidak ada perbedaan yang sangat terlihat, karena nilai kemampuan tiap provinsi tidak banyak variasi.



Gambar 4.4

Peta Kemampuan Retribusi Daerah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

4.3.5 Peta Kemampuan Dana Perimbangan Dalam Menghapuskan

Kemiskinan

Gambar 4.5 adalah peta yang menyajikan data kemampuan retribusi daerah setiap provinsi di Indonesia, dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Data tersebut diinformasikan dalam bentuk gradasi warna merah. Gradasi pewarnaan pada peta tersebut mengikuti besar kecilnya nilai kemampuan, dimulai dari warna putih yang bernilai 0 sebagai nilai kemampuan terkecil, dan semakin berwarna merah jika nilai kemampuannya semakin meningkat, diakhiri dengan warna merah gelap pada nilai kemampuan tertinggi. Provinsi dengan warna merah paling gelap adalah DKI Jakarta dengan nilai kemampuan tertinggi sebesar 8,3 dan nilai kemampuan terendah adalah Papua sebesar 0,7, yang merupakan provinsi dengan warna merah yang paling cerah.

Persebaran warna pada peta di Gambar 4.5 yang menginformasikan nilai kemampuan, cukup memperlihatkan perbedaan nilai kemampuan antar provinsi di Indonesia. Ini terjadi karena rata-rata nilai kemampuan sebesar 2,4, dimana nilai kemampuan berada pada interval 0,7-8,3 sehingga terdapat beberapa provinsi dengan warna merah yang cukup pekat. Di wilayah timur Indonesia, provinsi Papua dan Papua Barat cukup berbeda gradasi warnanya, dan Maluku serta sekitarnya tetap menjadi yang tergelap di wilayah timur. Di wilayah bagian tengah, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara menjadi provinsi yang cukup berwarna pekat. Wilayah barat yang berwarna pekat selain DKI Jakarta adalah Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.



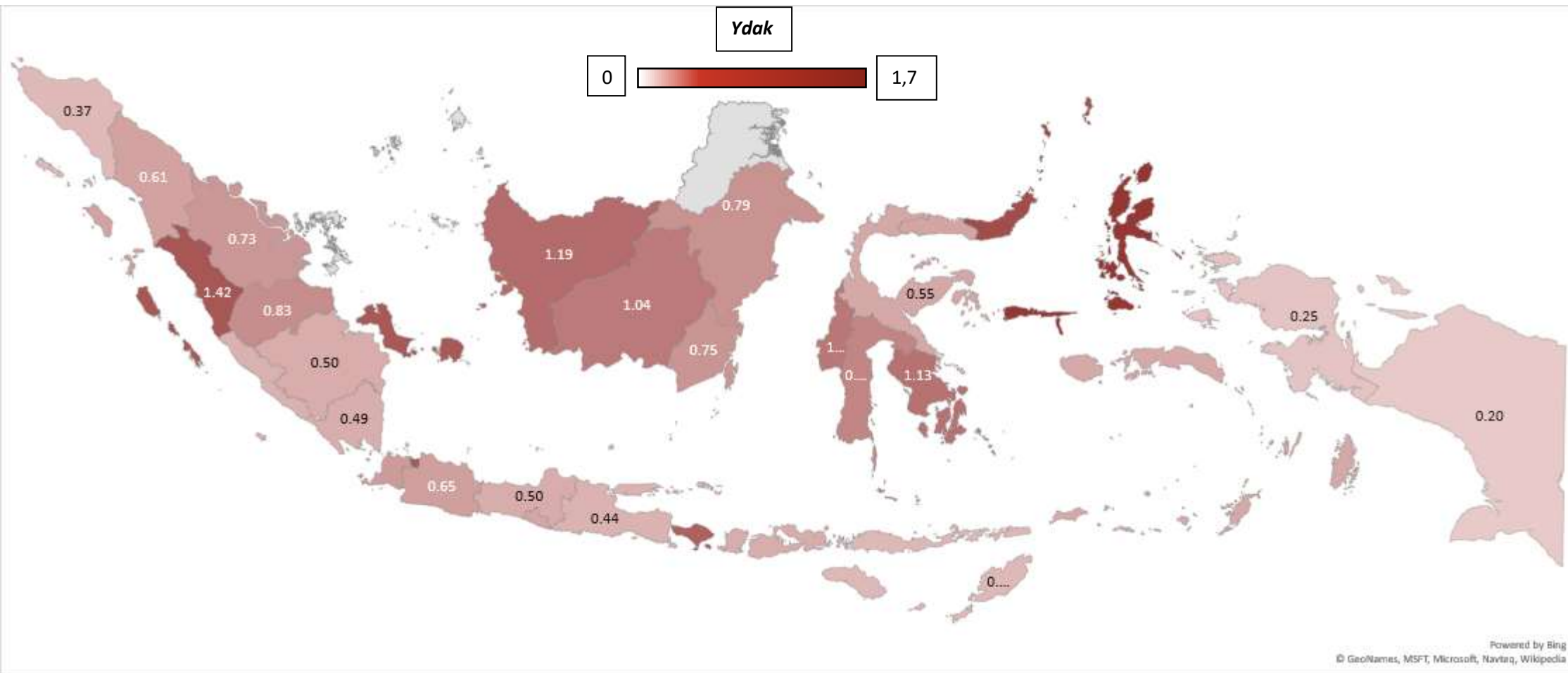
Gambar 4.5
Peta Kemampuan Dana Perimbangan 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

4.3.6 Peta Kemampuan Dana Alokasi Khusus Dalam Menghapuskan

Kemiskinan

Gambar 4.6 adalah peta kemampuan dana alokasi khusus, yang diwarnai dengan gradasi warna merah dan merupakan cerminan dari kemampuan DAK di setiap provinsi di Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Dalam gambar tersebut, nilai kemampuan terkecil yaitu 0 dimulai dengan warna putih, semakin naik nilai kemampuannya warnanya akan semakin mengarah menjadi merah tua/gelap, dan sampai pada nilai kemampuan tertinggi yaitu 1,7, warna pada peta akan menjadi merah gelap. Maluku Utara, provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi, terlihat sebagai provinsi dengan warna paling gelap di antara semua provinsi, dan provinsi dengan nilai kemampuan terendah adalah Papua, yang pada peta di Gambar 4.6 merupakan provinsi dengan warna paling cerah dibandingkan dengan provinsi seluruhnya.

Persebaran warna pada peta di Gambar 4.6 yang menginformasikan nilai kemampuan, cukup memperlihatkan perbedaan nilai kemampuan antar provinsi di Indonesia. Ini terjadi karena rata-rata nilai kemampuan sebesar 0,8, dimana nilai kemampuan berada pada interval 0,2-1,7 sehingga terdapat beberapa provinsi dengan warna merah yang cukup pekat. Di wilayah timur Indonesia, provinsi Maluku Utara dan sekitarnya tetap menjadi yang tergelap (paling mampu) di wilayah timur. Di wilayah bagian tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Bali, dan Sulawesi Tenggara menjadi provinsi yang cukup berwarna gelap. Wilayah barat yang berwarna paling pekat adalah Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.

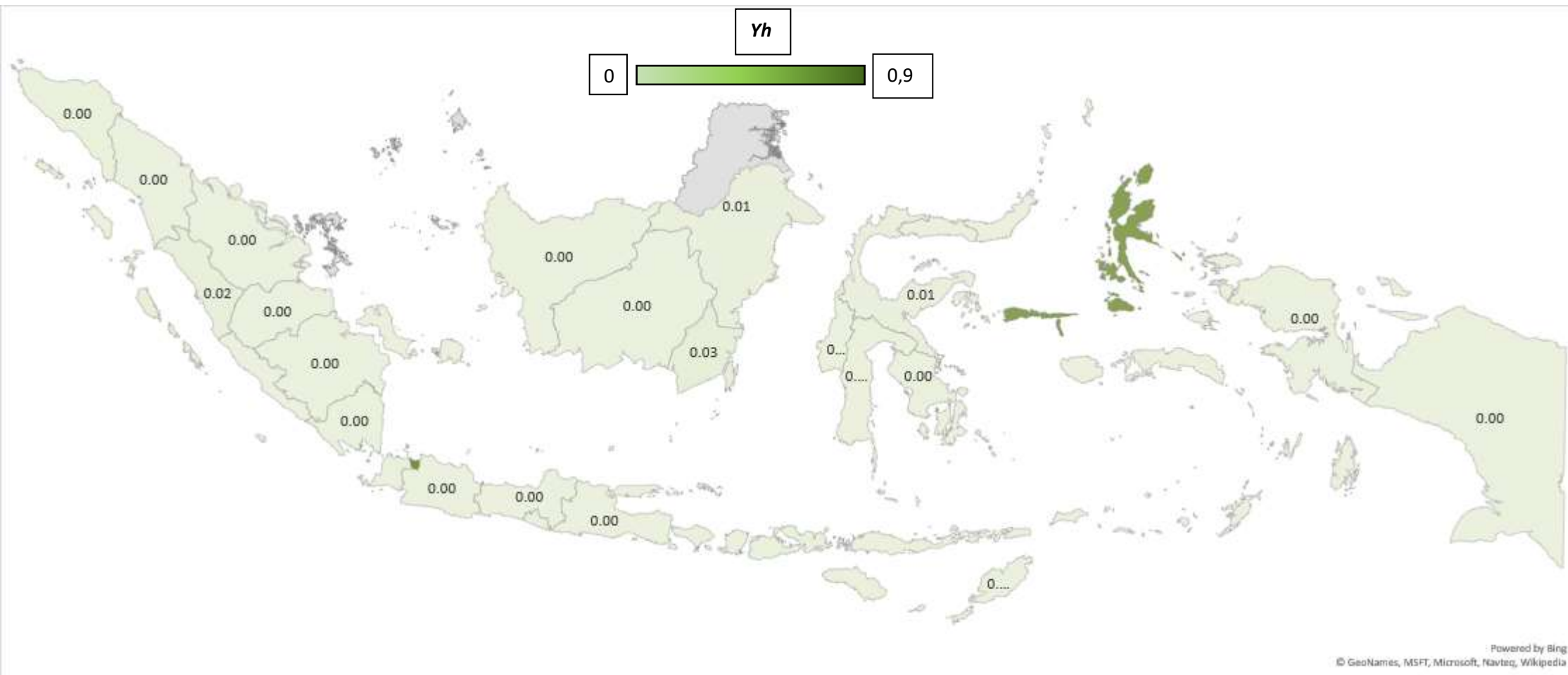


Gambar 4.6
Peta Kemampuan Dana Alokasi Khusus 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

4.3.7 Peta Kemampuan Hibah Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Peta di Gambar 4.7 dengan pewarnaan gradasi hijau, adalah gambar yang menginformasikan kemampuan hibah setiap provinsi di Indonesia, dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Gradasi pewarnaan pada peta tersebut mengikuti besar kecilnya nilai kemampuan, dimulai dari warna hijau terang sebagai nilai kemampuan terkecil yaitu 0, dan semakin berwarna tua jika nilai kemampuannya semakin meningkat, diakhiri dengan warna hijau gelap pada nilai kemampuan tertinggi. Provinsi dengan warna hijau paling gelap adalah DKI Jakarta dengan nilai kemampuan tertinggi sebesar 0,9 dan nilai kemampuan terendah ada pada 11 provinsi dengan nilai kemampuan sebesar 0,0, yang merupakan provinsi dengan warna biru yang paling cerah.

Berbeda dengan persebaran warna pada peta-peta sebelumnya, hampir semua persebaran warna pada peta di Gambar 4.7 yang menginformasikan nilai kemampuan, tidak terlalu memperlihatkan perbedaan nilai kemampuan antar provinsi di Indonesia. Ini terjadi karena rata-rata nilai kemampuan secara keseluruhan hanya sebesar 0,06, dimana nilai kemampuan tertinggi sebesar 0,98 (1 provinsi) dan terendah adalah 0 (11 provinsi), sehingga banyak provinsi akan memiliki warna hijau cerah yang tidak berbeda jauh dengan warna provinsi lainnya. Di wilayah timur Indonesia, hanya Maluku Utara yang sedikit berwarna lebih gelap. Di wilayah bagian tengah, tidak ada satupun provinsi yang sangat menonjol perbedaan warnanya. Wilayah barat hampir seluruhnya berwarna hijau cerah, kecuali DKI Jakarta dengan nilai tertinggi. Tidak ada perbedaan yang sangat terlihat, karena nilai kemampuan tiap provinsi tidak banyak variasi.



Gambar 4.7
Peta Kemampuan Hibah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

4.3.8 Peta Kemampuan Belanja Hibah Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Gambar 4.8 adalah peta kemampuan belanja hibah, yang diwarnai dengan gradasi warna hijau dan merupakan cerminan dari kemampuan belanja hibah di setiap provinsi di Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Dalam gambar tersebut, nilai kemampuan terkecil yaitu 0 dimulai dengan warna putih, semakin naik nilai kemampuannya warnanya akan semakin mengarah menjadi hijau tua, dan sampai pada nilai kemampuan tertinggi yaitu 1,2, warna pada peta akan menjadi hijau gelap. Bali adalah provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi, terlihat sebagai provinsi dengan warna paling gelap di antara semua provinsi, dan provinsi dengan nilai kemampuan terendah adalah Aceh sebesar 0,1, yang pada peta di Gambar 4.8 merupakan provinsi dengan warna paling cerah dibandingkan dengan provinsi seluruhnya.

Persebaran warna pada peta di Gambar 4.8 yang menginformasikan nilai kemampuan, cukup memperlihatkan perbedaan nilai kemampuan antar provinsi di Indonesia. Ini terjadi karena rata-rata nilai kemampuan sebesar 0,6, dimana nilai kemampuan berada pada interval 0,1-1,2 sehingga terdapat beberapa provinsi dengan warna hijau yang cukup pekat. Di wilayah timur Indonesia, provinsi Maluku Utara dan sekitarnya tetap menjadi yang tergelap (paling mampu) di wilayah timur. Di wilayah bagian tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, seluruh Kalimantan, dan Bali menjadi provinsi yang cukup berwarna gelap. Wilayah barat yang berwarna paling pekat adalah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.



Gambar 4.8
Peta Kemampuan Belanja Hibah 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

4.3.9 Peta Kemampuan Belanja Bantuan Sosial Dalam Menghapuskan

Kemiskinan

Peta di Gambar 4.9 dengan pewarnaan gradasi oranye, adalah gambar yang menginformasikan kemampuan belanja bantuan sosial setiap provinsi di Indonesia, dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Gradasi pewarnaan pada peta tersebut mengikuti besar kecilnya nilai kemampuan, dimulai dari warna oranye terang sebagai nilai kemampuan terkecil yaitu 0, dan semakin berwarna tua jika nilai kemampuannya semakin meningkat, diakhiri dengan warna oranye gelap pada nilai kemampuan tertinggi. Provinsi dengan warna oranye paling gelap adalah DKI Jakarta dengan nilai kemampuan tertinggi sebesar 1,1 dan nilai kemampuan terendah ada pada 6 provinsi dengan nilai kemampuan sebesar 0, yang merupakan provinsi dengan warna oranye yang paling cerah.

Persebaran warna pada peta di Gambar 4.9 yang menginformasikan nilai kemampuan, tidak terlalu memperlihatkan perbedaan nilai kemampuan antar provinsi di Indonesia. Ini terjadi karena rata-rata nilai kemampuan secara keseluruhan hanya sebesar 0,04, dimana nilai kemampuan tertinggi sebesar 1,11 (1 provinsi) dan terendah adalah 0 (6 provinsi), ketimpangan ini menyebabkan banyak provinsi akan memiliki warna oranye cerah yang tidak berbeda jauh dengan warna provinsi lainnya. Di wilayah timur Indonesia, tidak ada provinsi yang berwarna gelap. Di wilayah bagian tengah, tidak ada satupun provinsi yang sangat menonjol perbedaan warnanya. Wilayah barat hampir seluruhnya berwarna cerah, kecuali DKI Jakarta dengan nilai tertinggi. Tidak ada perbedaan yang sangat terlihat, karena nilai kemampuan tiap provinsi tidak banyak bervariasi.

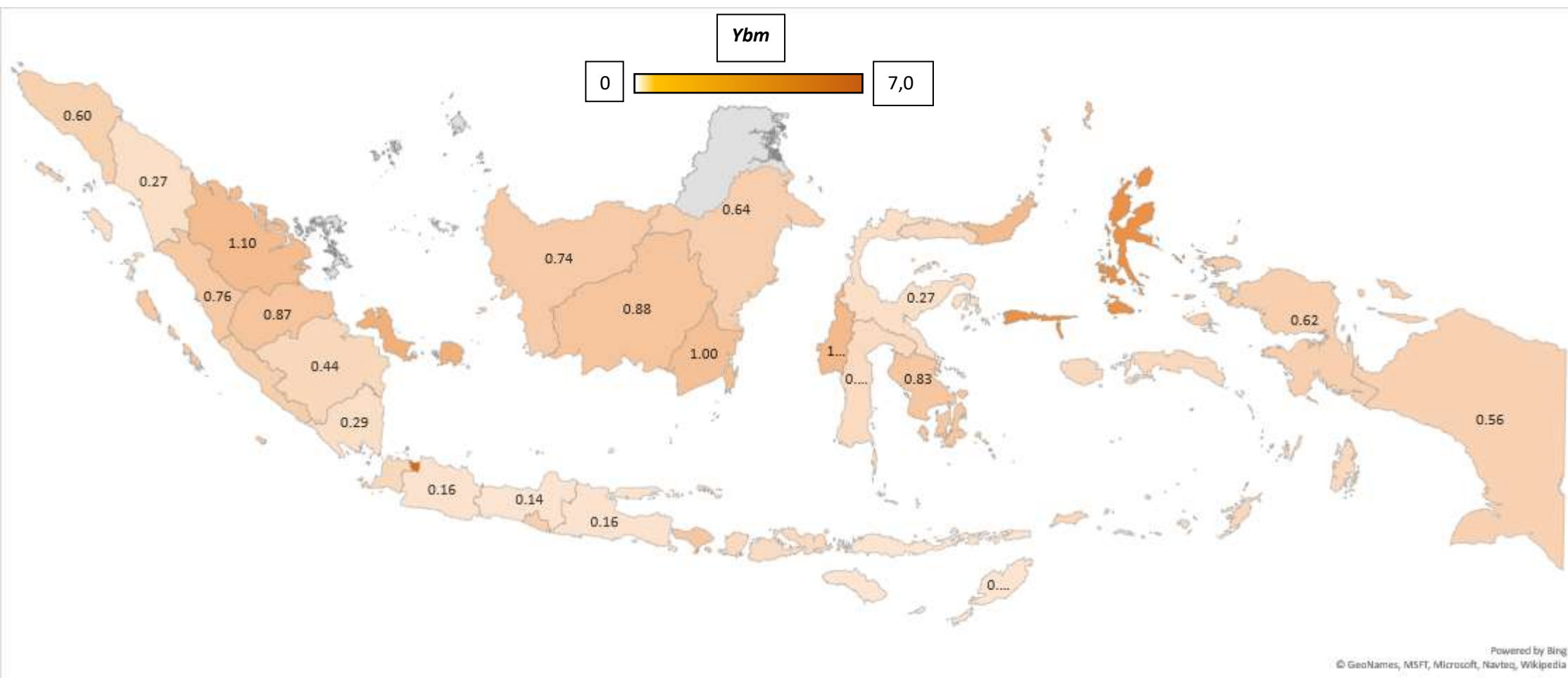


Gambar 4.9
Peta Kemampuan Belanja Bantuan Sosial 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

4.3.10 Peta Kemampuan Belanja Modal Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Gambar 4.10 adalah peta kemampuan belanja modal, yang diwarnai dengan gradasi warna oranye dan merupakan cerminan dari kemampuan belanja modal di setiap provinsi di Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Dalam gambar tersebut, nilai kemampuan terkecil yaitu 0 dimulai dengan oranye cerah/muda, semakin naik nilai kemampuannya warnanya akan semakin mengarah menjadi oranye tua, dan sampai pada nilai kemampuan tertinggi yaitu 7,05, warna pada peta akan menjadi oranye gelap. DKI Jakarta, provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi, terlihat sebagai provinsi dengan warna paling gelap di antara semua provinsi, dan provinsi dengan nilai kemampuan terendah adalah Nusa Tenggara Timur, yang pada peta di Gambar 4.10 merupakan provinsi dengan warna paling cerah dibandingkan dengan provinsi seluruhnya.

Persebaran warna pada peta di Gambar 4.10 yang menginformasikan nilai kemampuan, cukup memperlihatkan perbedaan nilai kemampuan antar provinsi di Indonesia. Ini terjadi karena rata-rata nilai kemampuan secara keseluruhan sebesar 0,9, sehingga terdapat beberapa provinsi dengan warna oranye yang cukup pekat. Di wilayah timur Indonesia, provinsi Maluku Utara dan sekitarnya tetap menjadi yang tergelap (paling mampu) di wilayah timur. Di wilayah bagian tengah, semua provinsi di Kalimantan dan Sulawesi Tenggara menjadi provinsi yang cukup berwarna gelap. Wilayah barat yang berwarna paling pekat adalah provinsi Riau dan DKI Jakarta.



Gambar 4.10
Peta Kemampuan Belanja Modal 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskina

4.4 Peringkat Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Tabel 4.12
Peringkat Kemampuan Keuangan 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Provinsi	Rata-rata	Ranking	Provinsi	Rata-rata	Ranking
DKI JAKARTA	8,16	1	BANTEN	0,91	18
KALIMANTAN UTARA	2,50	2	DI YOGYAKARTA	0,80	19
MALUKU UTARA	2,31	3	PAPUA BARAT	0,78	20
BALI	2,05	4	GORONTALO	0,70	21
KEP. BANGKA BELITUNG	1,99	5	JAWA BARAT	0,69	22
KALIMANTAN TENGAH	1,63	6	ACEH	0,63	23
KALIMANTAN SELATAN	1,60	7	SUMATERA SELATAN	0,61	24
SULAWESI UTARA	1,58	8	SUMATERA UTARA	0,58	25
KALIMANTAN TIMUR	1,54	9	BENGKULU	0,57	26
SUMATERA BARAT	1,41	10	SULAWESI TENGAH	0,56	27
KALIMANTAN BARAT	1,17	11	MALUKU	0,56	28
RIAU	1,13	12	JAWA TENGAH	0,53	29
SULAWESI BARAT	1,12	13	LAMPUNG	0,52	30
SULAWESI TENGGARA	1,10	14	JAWA TIMUR	0,51	31
KEP. RIAU	1,06	15	NUSA TENGGARA BARAT	0,50	32
JAMBI	1,05	16	PAPUA	0,43	33
SULAWESI SELATAN	0,95	17	NUSA TENGGARA TIMUR	0,29	34

Sumber: Tabel 4.2 – 4.11 (diolah)

Peringkat kemampuan 34 provinsi dalam menghapuskan kemiskinan disajikan dalam Tabel 4.12. Peringkat ini merujuk pada rata-rata kemampuan seluruh komponen APBD yang dipilih. Secara keseluruhan, terdapat 3 provinsi dengan kategori mampu, 11 provinsi cukup mampu, 17 provinsi tidak mampu, dan 3 provinsi sangat tidak mampu dalam menghapuskan kemiskinan dengan menggunakan komponen APBD yang dipilih secara keseluruhan.



Gambar 4.11
Peta Peringkat Kemampuan Keuangan 34 Provinsi Dalam Menghapuskan Kemiskinan

Gambar 4.11 adalah peta peringkat kemampuan keuangan 34 provinsi dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Peta ini menginformasikan peringkat kemampuan setiap provinsi, berdasarkan nilai rata-rata kemampuan 10 komponen APBD yang dipilih dan divisualisasikan dengan gradasi warna ungu. Dalam gambar tersebut, warna ungu paling cerah menandakan nilai rata-rata kemampuan terendah, yaitu sebesar 0,29 dan berada di urutan 34. Semakin tinggi rata-rata nilai kemampuannya, warnanya akan semakin mengarah menjadi ungu tua, dan sampai pada rata-rata nilai kemampuan tertinggi yaitu 8,16, warna pada peta akan menjadi ungu gelap. DKI Jakarta adalah provinsi dengan nilai kemampuan tertinggi, terlihat sebagai provinsi dengan warna paling gelap di antara semua provinsi, dan provinsi dengan nilai kemampuan terendah adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 0,2, yang pada peta merupakan provinsi dengan warna paling cerah dibandingkan dengan provinsi seluruhnya.

Persebaran warna pada peta di Gambar 4.11 yang menginformasikan peringkat nilai kemampuan, cukup memperlihatkan variasi persebaran antar provinsi di Indonesia. Di wilayah timur Indonesia, provinsi Maluku Utara dan sekitarnya tetap menjadi yang paling mampu menghapuskan kemiskinan secara langsung di wilayah timur dengan menduduki peringkat ke 3. Di wilayah bagian tengah, Kalimantan Timur dan Utara, serta Bali menjadi provinsi yang menduduki peringkat 9 besar. Wilayah barat yang menduduki peringkat atas adalah DKI Jakarta (1) dan Kep. Bangka Belitung (5). Tiga peringkat terendah ada pada provinsi di wilayah timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua, serta diikuti provinsi lain secara acak.

BAB V

PENUTUP

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang peta kemampuan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan tahun 2017, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Setiap pemerintah daerah, memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menghapuskan kemiskinan di masing-masing provinsi.
2. Nilai kemampuan suatu provinsi pada komponen APBD tertentu, tidak pernah sama dengan nilai kemampuan pada komponen APBD yang lain.
3. Provinsi-provinsi di wilayah bagian barat cenderung lebih memiliki kemampuan untuk menghapuskan kemiskinan, dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah bagian timur.
4. Komponen APBD yang sebagian besar provinsi mampu menggunakannya untuk menghapuskan kemiskinan adalah pendapatan dan dana perimbangan. Sisanya adalah komponen APBD yang sebagian besar provinsi, tidak mampu menggunakannya untuk menghapuskan kemiskinan.
5. Tiga provinsi paling mampu menghapuskan kemiskinan menggunakan APBD adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara.
6. Tiga provinsi paling tidak mampu menghapuskan kemiskinan menggunakan APBD adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Daerah-daerah yang terpetakan berkemampuan rendah dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung, dapat diutamakan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga negara, maupun organisasi dan perseorangan diluar pemerintah, untuk diberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan seperti bantuan untuk pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, serta papan, keamanan, infrastruktur publik, dan sebagainya.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti kemampuan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dalam menghapuskan kemiskinan dengan cara-cara yang tidak langsung/menggunakan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, S., (1983), "Inequality and Poverty in Malaysia: Measurement and Decomposition", *Oxford University Press*, August, pp. 1-16
- Badan Pusat Statistik., (2005), "Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan", *Website BPS*, diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> pada tanggal 09 Oktober 2018.
- Badan Pusat Statistik., (2009), *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2009*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Boex, J., Ortiz, E.J.H., Martinez, V., Timofeev, A., dan Yao, G., (2006), "Fighting Poverty through Fiscal Decentralisation". *US Agency for International Development*, March, pp. 20-41
- Braun, J.V., dan Grote, U., (2000), "Does Decentralization Serve The Poor?", *Paper*, Conference IMF on Fiscal Decentralization, Washington D.C. 20-21 November 2000.
- Cheyne, C., O'Brien, M., dan Belgrave, M., (1998), *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*, Fourth edition, Oxford University Press, Auckland.
- Durongkaveroj, W., (2018), "A Minimum Injection to Eliminate of Poverty: Foster-Greer-Thorbecke Poverty Index and SAM Multiplier", *International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics*, Vol. 11, No. 1, pp. 43-55

- Khaleghian, P., (2003), “Decentralization and Public Services: The Case of Immunization”, *World Bank Policy Research Working Paper*, pp. 29-89
- Khandker, S.R., dan Haughton, J., (2009), *Handbook on Poverty + Inequality*, World Bank, Washington D.C.
- Kunarjo., (2002), *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Edisi 1, UI Press, Jakarta.
- Kusreni, S., dan Suhab, S., (2009), “Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan”, *DIE - Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, April, Vol. 5, No. 3, hal. 1-10
- Lambert, P.J., dan Ramos, X., (2002), “Welfare comparisons: Sequential Procedures for Heterogeneous Populations”, *Economica*, March, Vol. 18, No. 69: 549–562
- Milanovic, B., (2002), “Do We Tend to Overestimate Poverty Gaps? The impact of Equivalency Scales on the Calculation of the Poverty Gap”, *Applied Economics Letters*, World Bank Research Department, Vol. 9, pp. 69-72
- Nurkse, R., (1953), “Ragnar Nurkse's Development Theory: Influences and Perceptions”, *Estonian Academy of Sciences*, August, pp. 1-23
- Paramita, R., (2013), “Pengaruh APBD (PAD, DAU, SiLPA, Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD) Terhadap Anggaran Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah – D.I. Yogyakarta Periode 2007 – 2010”, *EKBISI*, Vol. VIII, No. 1, hal. 35 - 46

- Quiggin, J., dan Mahadevan, R., (2015), “The Poverty Burden: a Measure of the Difficulty of Ending Extreme Poverty”, *Journal of the Asia Pacific Economy*, Vol.20, No. 2, pp. 167-177
- Sachs, J.D., (2005), *The End Of Poverty*, The Penguin Press, New York.
- Sachs, J.D., dan Warner, A.M., (2001), “The Curse of Natural Resource”, *European Economic Review*, Elseiver, Vol. 45, No 4: 827-838
- Sasana, H., (2012), “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”, *Media Ekonomi dan Manajemen*, Januari, Vol. 25, No. 1
- Subramanian, S., (2008), “Global Poverty, Inequality, and Aid Flows: A Rough Guide to Some Simple Justice”, *Economic & Political Weekly*, Special Volume, November, pp. 53-63
- Suharto, E., (2009), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Suprayitno, B., (2017), *Ekonomi Publik (Konsep & Implementasi Kebijakan)*, Cetakan I, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Syahyuti., (2006), *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian (Penjelasan konsep, istilah, teori, dan indikator variabel)*, Bina Rena Pariwara , Jakarta.
- Todaro, M.P., (2006), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.

- Todaro, M.P., dan Smith, S.C., (2006), *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 11, Erlangga, Jakarta.
- Wahyudi., (2011), “Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009)”, *Tesis*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- World Bank, (2001), “World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty”, World Bank, New York.
- Yao, G, A., 2007, “Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence”, *Dissertation*, diakses dari https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=econ_diss pada tanggal 19 Oktober 2018.

LAMPIRAN 1

Data Nilai Komponen APBD

PROVINSI	Pendapatan (P)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Daerah (PD)	Retribusi Daerah (RD)	Dana Perimbangan (Daper)
ACEH	Rp14.291.939.315.863	Rp2.227.055.653.755	Rp1.299.742.665.000	Rp10.068.000.000	Rp3.741.189.009.600
SUMATERA UTARA	Rp12.170.582.105.913	Rp4.925.627.725.733	Rp4.486.811.919.686	Rp33.959.567.600	Rp7.235.420.477.680
SUMATERA BARAT	Rp6.110.976.953.502	Rp2.044.504.493.000	Rp1.533.304.000.000	Rp19.945.846.000	Rp3.990.886.148.502
RIAU	Rp8.859.017.595.981	Rp3.735.800.000.000	Rp3.000.000.000.000	Rp14.000.000.000	Rp5.120.242.595.981
JAMBI	Rp4.163.724.816.402	Rp1.393.072.790.798	Rp1.189.792.800.000	Rp20.901.481.500	Rp2.766.192.134.604
SUMATERA SELATAN	Rp8.195.110.542.121	Rp3.016.085.362.904	Rp2.832.420.650.854	Rp14.542.756.000	Rp5.175.402.210.000
BENGKULU	Rp3.041.325.078.997	Rp905.536.548.769	Rp646.249.665.995	Rp14.924.662.000	Rp2.132.917.440.228
LAMPUNG	Rp6.723.785.171.614	Rp2.649.215.474.000	Rp2.394.300.000.000	Rp5.706.996.000	Rp4.031.511.697.614
DKI JAKARTA	Rp62.466.130.203.554	Rp41.488.193.370.554	Rp35.230.000.000.000	Rp677.885.370.000	Rp18.770.211.233.000
JAWA BARAT	Rp30.540.901.041.552	Rp16.524.120.917.766	Rp15.238.472.081.401	Rp58.245.147.484	Rp13.987.089.323.786
JAWA TENGAH	Rp23.467.518.025.000	Rp11.967.160.406.000	Rp10.166.892.000.000	Rp99.766.182.000	Rp11.414.817.176.000
DI YOGYAKARTA	Rp4.988.379.317.715	Rp1.657.147.882.129	Rp1.437.942.970.424	Rp38.797.469.715	Rp2.461.741.043.739
JAWA TIMUR	Rp27.932.994.314.123	Rp14.900.003.388.123	Rp12.179.000.000.000	Rp120.081.924.000	Rp13.025.490.926.000
KALIMANTAN BARAT	Rp5.095.395.280.000	Rp1.674.190.144.000	Rp1.445.912.639.000	Rp35.942.515.000	Rp3.413.705.136.000
KALIMANTAN TENGAH	Rp4.086.898.379.226	Rp1.327.494.134.000	Rp1.088.380.040.000	Rp9.934.994.000	Rp2.615.492.050.226
KALIMANTAN SELATAN	Rp5.499.059.991.000	Rp3.205.743.749.000	Rp2.685.646.913.000	Rp25.460.405.000	Rp2.261.014.391.000
KALIMANTAN TIMUR	Rp8.098.900.000.000	Rp3.987.452.610.000	Rp3.034.590.000.000	Rp23.133.125.000	Rp4.092.045.390.000
SULAWESI UTARA	Rp3.556.372.800.000	Rp1.076.342.496.000	Rp908.800.896.000	Rp73.936.400.000	Rp2.429.190.571.000
SULAWESI TENGAH	Rp3.579.386.410.150	Rp914.431.692.350	Rp782.619.046.300	Rp5.155.511.950	Rp2.646.828.119.800
SULAWESI SELATAN	Rp8.894.428.775.365	Rp3.724.172.762.535	Rp3.314.207.500.000	Rp90.140.041.800	Rp5.158.708.141.000
SULAWESI TENGGARA	Rp3.545.198.442.343	Rp743.891.514.197	Rp628.118.997.000	Rp11.971.877.210	Rp2.748.755.754.146
BALI	Rp6.222.703.627.308	Rp3.250.531.000.000	Rp2.901.766.388.675	Rp48.738.042.608	Rp2.673.596.252.308

PROVINSI	Pendapatan (P)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Daerah (PD)	Retribusi Daerah (RD)	Dana Perimbangan (Daper)
NUSA TENGGARA BARAT	Rp4.791.397.359.569	Rp1.501.611.335.359	Rp1.122.139.007.935	Rp18.459.358.000	Rp3.222.521.202.310
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp4.722.736.609.000	Rp1.004.044.139.304	Rp766.961.319.888	Rp25.821.710.000	Rp3.700.529.340.696
MALUKU	Rp2.860.026.790.976	Rp519.252.405.976	Rp335.588.052.287	Rp79.932.620.369	Rp2.333.050.345.000
PAPUA	Rp13.968.876.703.796	Rp1.308.280.585.796	Rp1.030.423.565.000	Rp82.930.263.480	Rp4.419.279.187.000
MALUKU UTARA	Rp2.864.175.974.702	Rp486.709.146.169	Rp364.562.246.169	Rp66.388.300.000	Rp1.907.792.409.000
BANTEN	Rp9.790.923.478.551	Rp5.666.689.017.551	Rp5.444.173.000.000	Rp20.891.830.000	Rp4.118.564.461.000
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp2.355.579.069.316	Rp678.913.155.746	Rp557.198.594.110	Rp15.448.205.015	Rp1.666.665.913.570
GORONTALO	Rp1.831.692.829.014	Rp356.398.685.000	Rp326.098.685.000	Rp6.000.000.000	Rp1.467.294.144.014
KEP. RIAU	Rp3.201.558.825.099	Rp1.104.344.658.037	Rp1.001.764.658.037	Rp8.810.000.000	Rp2.096.085.459.062
PAPUA BARAT	Rp6.888.867.177.840	Rp403.269.106.650	Rp262.246.500.000	Rp1.622.250.000	Rp3.196.319.386.190
SULAWESI BARAT	Rp1.813.836.670.297	Rp299.021.359.051	Rp252.443.859.051	Rp20.790.000.000	Rp1.512.701.624.000
KALIMANTAN UTARA	Rp2.335.152.982.580	Rp419.868.015.909	Rp293.334.558.388	Rp140.000.000	Rp1.800.696.737.000

PROVINSI	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Hibah (H)	Belanja Hibah (BH)	Belanja Bantuan Sosial (BBS)	Belanja Modal (BM)
ACEH	Rp1.560.836.260.000	Rp20.072.860.947	Rp677.188.600.000	Rp206.251.075.000	Rp2.529.205.111.425
SUMATERA UTARA	Rp4.028.793.501.000	Rp9.533.902.500	Rp3.658.144.919.358	Rp0	Rp1.790.920.557.785
SUMATERA BARAT	Rp1.764.826.227.000	Rp25.237.360.000	Rp1.088.582.600.000	Rp0	Rp950.436.027.269
RIAU	Rp1.686.338.599.000	Rp2.975.000.000	Rp1.015.273.599.500	Rp10.000.000.000	Rp2.545.984.515.117
JAMBI	Rp967.584.195.000	Rp1.606.412.000	Rp647.306.190.000	Rp0	Rp1.011.118.961.105
SUMATERA SELATAN	Rp2.017.260.971.000	Rp0	Rp1.652.294.054.000	Rp600.000.000	Rp1.768.324.028.745
BENGKULU	Rp698.654.088.000	Rp0	Rp385.302.209.000	Rp0	Rp1.010.591.426.294
LAMPUNG	Rp1.902.233.143.000	Rp17.558.000.000	Rp1.507.323.000.000	Rp6.000.000.000	Rp1.132.527.817.850
DKI JAKARTA	Rp3.148.971.878.000	Rp2.207.725.600.000	Rp1.458.036.810.329	Rp2.499.348.722.000	Rp15.881.105.921.301
JAWA BARAT	Rp9.271.387.610.000	Rp22.190.800.000	Rp10.382.158.831.892	Rp38.479.445.000	Rp2.291.591.432.720

PROVINSI	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Hibah (H)	Belanja Hibah (BH)	Belanja Bantuan Sosial (BBS)	Belanja Modal (BM)
JAWA TENGAH	Rp6.739.830.931.000	Rp35.342.500.000	Rp4.943.528.652.000	Rp248.562.000.000	Rp1.850.318.118.000
DI YOGYAKARTA	Rp949.084.379.000	Rp14.827.192.847	Rp719.522.034.000	Rp2.091.000.000	Rp1.040.563.177.076
JAWA TIMUR	Rp7.298.679.584.000	Rp0	Rp6.430.091.440.000	Rp10.000.000.000	Rp2.639.437.686.978
KALIMANTAN BARAT	Rp1.516.275.910.000	Rp0	Rp854.992.300.000	Rp720.000.000	Rp938.632.097.900
KALIMANTAN TENGAH	Rp691.371.136.500	Rp0	Rp437.578.149.100	Rp43.165.641.626	Rp585.104.199.125
KALIMANTAN SELATAN	Rp756.875.482.000	Rp32.301.851.000	Rp556.180.000.000	Rp0	Rp1.004.879.926.582
KALIMANTAN TIMUR	Rp1.133.767.347.000	Rp11.902.000.000	Rp867.158.700.000	Rp5.010.000.000	Rp925.853.953.600
SULAWESI UTARA	Rp990.544.016.000	Rp0	Rp522.738.500.000	Rp500.000.000	Rp697.064.709.420
SULAWESI TENGAH	Rp970.464.430.000	Rp10.626.598.000	Rp601.681.000.000	Rp1.000.000.000	Rp479.617.819.283
SULAWESI SELATAN	Rp2.595.323.502.000	Rp11.547.871.830	Rp1.898.113.207.000	Rp600.000.000	Rp1.059.508.067.228
SULAWESI TENGGARA	Rp1.047.428.797.000	Rp0	Rp707.025.070.000	Rp0	Rp774.553.129.529
BALI	Rp1.156.284.908.000	Rp4.890.000.000	Rp1.073.267.400.000	Rp12.640.400.000	Rp706.058.699.119
NUSA TENGGARA BARAT	Rp1.372.422.968.000	Rp13.870.510.900	Rp980.897.000.000	Rp17.455.318.500	Rp990.736.512.308
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp1.829.232.986.000	Rp10.663.129.000	Rp1.348.419.750.000	Rp23.151.000.000	Rp582.791.379.218
MALUKU	Rp774.788.871.000	Rp224.040.000	Rp496.178.001.020	Rp12.000.000.000	Rp583.835.639.775
PAPUA	Rp1.242.997.670.000	Rp500.000.000	Rp1.089.144.837.924	Rp91.509.700.000	Rp3.530.217.099.935
MALUKU UTARA	Rp582.354.704.000	Rp274.053.373.653	Rp335.071.600.000	Rp5.480.000.000	Rp689.577.436.442
BANTEN	Rp2.377.527.706.000	Rp5.670.000.000	Rp2.376.144.610.000	Rp138.877.500.000	Rp1.515.648.566.322
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp455.718.557.000	Rp0	Rp311.439.900.000	Rp943.000.000	Rp448.618.181.761
GORONTALO	Rp413.822.549.000	Rp500.000.000	Rp296.034.032.500	Rp2.103.000.000	Rp290.272.140.204
KEP. RIAU	Rp552.049.537.000	Rp0	Rp384.464.250.000	Rp6.500.873.632	Rp581.114.467.338
PAPUA BARAT	Rp419.628.903.000	Rp0	Rp753.103.059.000	Rp43.660.000.000	Rp1.040.173.110.473
SULAWESI BARAT	Rp509.140.875.000	Rp0	Rp354.099.656.128	Rp19.000.000.000	Rp540.094.348.826
KALIMANTAN UTARA	Rp308.016.815.000	Rp969.480.000	Rp228.199.000.000	Rp4.000.000.000	Rp951.352.690.355

LAMPIRAN 2

Data Indeks Kedalaman Kemiskinan, Jumlah Penduduk, dan Garis

Kemiskinan

Provinsi	Indeks KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Garis Kemiskinan
ACEH	0,15	5.096.200	Rp5.496.132
SUMATERA UTARA	0,09	14.102.900	Rp5.108.316
SUMATERA BARAT	0,04	5.259.500	Rp5.671.368
RIAU	0,06	6.501.000	Rp5.558.976
JAMBI	0,06	3.458.900	Rp5.493.816
SUMATERA SELATAN	0,10	8.160.900	Rp4.926.384
BENGKULU	0,14	1.904.800	Rp5.733.612
LAMPUNG	0,09	8.205.100	Rp5.042.724
DKI JAKARTA	0,03	10.277.600	Rp6.438.552
JAWA BARAT	0,07	47.379.400	Rp4.141.812
JAWA TENGAH	0,10	34.019.100	Rp4.014.264
DI YOGYAKARTA	0,10	3.720.900	Rp4.623.696
JAWA TIMUR	0,10	39.075.300	Rp4.129.968
KALIMANTAN BARAT	0,06	4.861.700	Rp4.550.244
KALIMANTAN TENGAH	0,06	2.550.200	Rp4.478.628
KALIMANTAN SELATAN	0,05	4.055.500	Rp4.949.424
KALIMANTAN TIMUR	0,06	3.501.200	Rp6.670.560
SULAWESI UTARA	0,07	2.436.900	Rp3.951.960
SULAWESI TENGAH	0,12	2.921.700	Rp4.997.436
SULAWESI SELATAN	0,09	8.606.400	Rp3.559.728
SULAWESI TENGGARA	0,10	2.551.000	Rp3.573.948
BALI	0,05	4.200.100	Rp4.447.380
NUSA TENGGARA BARAT	0,13	4.896.200	Rp4.263.000
NUSA TENGGARA TIMUR	0,19	5.203.500	Rp4.883.676
MALUKU	0,16	1.715.500	Rp5.251.728
PAPUA	0,33	3.207.400	Rp5.980.416
MALUKU UTARA	0,06	1.185.900	Rp4.924.944
BANTEN	0,06	12.203.100	Rp4.759.296
KEP. BANGKA BELITUNG	0,03	1.401.800	Rp6.854.748
GORONTALO	0,17	1.150.800	Rp3.581.904
KEP. RIAU	0,07	2.028.200	Rp6.197.016
PAPUA BARAT	0,30	893.400	Rp6.190.188
SULAWESI BARAT	0,10	1.306.500	Rp3.542.136
KALIMANTAN UTARA	0,06	666.300	Rp6.755.244

LAMPIRAN 3

Data Komponen Pendapatan (P), Biaya Minimum Penghapusan Kemiskinan(P_b) dan Rasio Kemampuan (Y_p)

Provinsi (i)	P	P_b (dalam Rp.)	Y_p
ACEH	Rp14.291.939.315.863	4.240.310.112.397	3,37
SUMATERA UTARA	Rp12.170.582.105.913	6.553.827.175.589	1,86
SUMATERA BARAT	Rp6.110.976.953.502	1.242.856.666.510	4,92
RIAU	Rp8.859.017.595.981	2.308.874.356.800	3,84
JAMBI	Rp4.163.724.816.402	1.161.267.565.480	3,59
SUMATERA SELATAN	Rp8.195.110.542.121	4.020.372.718.560	2,04
BENGKULU	Rp3.041.325.078.997	1.554.780.380.700	1,96
LAMPUNG	Rp6.723.785.171.614	3.907.738.498.727	1,72
DKI JAKARTA	Rp62.466.130.203.554	2.251.715.444.253	27,74
JAWA BARAT	Rp30.540.901.041.552	14.308.916.378.225	2,13
JAWA TENGAH	Rp23.467.518.025.000	13.371.661.409.985	1,76
DI YOGYAKARTA	Rp4.988.379.317.715	1.660.693.855.590	3,00
JAWA TIMUR	Rp27.932.994.314.123	16.474.181.647.770	1,70
KALIMANTAN BARAT	Rp5.095.395.280.000	275.082.961.214	4,00
KALIMANTAN TENGAH	Rp4.086.898.379.226	666.248.165.660	6,13
KALIMANTAN SELATAN	Rp5.499.059.991.000	1.003.619.451.600	5,48
KALIMANTAN TIMUR	Rp8.098.900.000.000	1.443.466.566.533	5,61
SULAWESI UTARA	Rp3.556.372.800.000	648.723.290.575	5,48
SULAWESI TENGAH	Rp3.579.386.410.150	1.774.428.148.063	2,02
SULAWESI SELATAN	Rp8.894.428.775.365	2.808.340.613.760	3,17
SULAWESI TENGGARA	Rp3.545.198.442.343	930.708.179.275	3,81
BALI	Rp6.222.703.627.308	882.084.701.517	7,05
NUSA TENGGARA BARAT	Rp4.791.397.359.569	2.797.494.872.083	1,71
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp4.722.736.609.000	4.835.378.479.225	0,98
MALUKU	Rp2.860.026.790.976	1.438.991.707.167	1,99
PAPUA	Rp13.968.876.703.796	6.260.656.632.533	2,23
MALUKU UTARA	Rp2.864.175.974.702	328.527.623.790	8,72
BANTEN	Rp9.790.923.478.551	3.468.557.077.440	2,82
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp2.355.579.069.316	326.972.431.648	7,20
GORONTALO	Rp1.831.692.829.014	709.909.493.440	2,58
KEP. RIAU	Rp3.201.558.825.099	846.647.514.977	3,78
PAPUA BARAT	Rp6.888.867.177.840	1.666.775.179.370	4,13
SULAWESI BARAT	Rp1.813.836.670.297	475.635.070.300	3,81
KALIMANTAN UTARA	Rp2.335.152.982.580	253.182.323.093	9,22

LAMPIRAN 4

Data Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Biaya MinimumPenghapusan Kemiskinan (P_b) dan Rasio Kemampuan (Y_{PAD})

Provinsi (i)	PAD	P_b (dalam Rp.)	Y_{PAD}
ACEH	Rp2.227.055.653.755	4.240.310.112.397	0,53
SUMATERA UTARA	Rp4.925.627.725.733	6.553.827.175.589	0,75
SUMATERA BARAT	Rp2.044.504.493.000	1.242.856.666.510	1,65
RIAU	Rp3.735.800.000.000	2.308.874.356.800	1,62
JAMBI	Rp1.393.072.790.798	1.161.267.565.480	1,20
SUMATERA SELATAN	Rp3.016.085.362.904	4.020.372.718.560	0,75
BENGKULU	Rp905.536.548.769	1.554.780.380.700	0,58
LAMPUNG	Rp2.649.215.474.000	3.907.738.498.727	0,68
DKI JAKARTA	Rp41.488.193.370.554	2.251.715.444.253	18,43
JAWA BARAT	Rp16.524.120.917.766	14.308.916.378.225	1,15
JAWA TENGAH	Rp11.967.160.406.000	13.371.661.409.985	0,89
DI YOGYAKARTA	Rp1.657.147.882.129	1.660.693.855.590	1,00
JAWA TIMUR	Rp14.900.003.388.123	16.474.181.647.770	0,90
KALIMANTAN BARAT	Rp1.674.190.144.000	275.082.961.214	1,31
KALIMANTAN TENGAH	Rp1.327.494.134.000	666.248.165.660	1,99
KALIMANTAN SELATAN	Rp3.205.743.749.000	1.003.619.451.600	3,19
KALIMANTAN TIMUR	Rp3.987.452.610.000	1.443.466.566.533	2,76
SULAWESI UTARA	Rp1.076.342.496.000	648.723.290.575	1,66
SULAWESI TENGAH	Rp914.431.692.350	1.774.428.148.063	0,52
SULAWESI SELATAN	Rp3.724.172.762.535	2.808.340.613.760	1,33
SULAWESI TENGGARA	Rp743.891.514.197	930.708.179.275	0,80
BALI	Rp3.250.531.000.000	882.084.701.517	3,69
NUSA TENGGARA BARAT	Rp1.501.611.335.359	2.797.494.872.083	0,54
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp1.004.044.139.304	4.835.378.479.225	0,21
MALUKU	Rp519.252.405.976	1.438.991.707.167	0,36
PAPUA	Rp1.308.280.585.796	6.260.656.632.533	0,21
MALUKU UTARA	Rp486.709.146.169	328.527.623.790	1,48
BANTEN	Rp5.666.689.017.551	3.468.557.077.440	1,63
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp678.913.155.746	326.972.431.648	2,08
GORONTALO	Rp356.398.685.000	709.909.493.440	0,50
KEP. RIAU	Rp1.104.344.658.037	846.647.514.977	1,30
PAPUA BARAT	Rp403.269.106.650	1.666.775.179.370	0,24
SULAWESI BARAT	Rp299.021.359.051	475.635.070.300	0,63
KALIMANTAN UTARA	Rp419.868.015.909	253.182.323.093	1,66

LAMPIRAN 5

Data Komponen Pajak Daerah (PD), Biaya Minimum PenghapusanKemiskinan (P_b) dan Rasio Kemampuan (Y_{PD})

Provinsi (i)	PD	P_b (dalam Rp.)	Y_{PD}
ACEH	Rp1.299.742.665.000	4.240.310.112.397	0,31
SUMATERA UTARA	Rp4.486.811.919.686	6.553.827.175.589	0,68
SUMATERA BARAT	Rp1.533.304.000.000	1.242.856.666.510	1,23
RIAU	Rp3.000.000.000.000	2.308.874.356.800	1,30
JAMBI	Rp1.189.792.800.000	1.161.267.565.480	1,02
SUMATERA SELATAN	Rp2.832.420.650.854	4.020.372.718.560	0,70
BENGKULU	Rp646.249.665.995	1.554.780.380.700	0,42
LAMPUNG	Rp2.394.300.000.000	3.907.738.498.727	0,61
DKI JAKARTA	Rp35.230.000.000.000	2.251.715.444.253	15,65
JAWA BARAT	Rp15.238.472.081.401	14.308.916.378.225	1,06
JAWA TENGAH	Rp10.166.892.000.000	13.371.661.409.985	0,76
DI YOGYAKARTA	Rp1.437.942.970.424	1.660.693.855.590	0,87
JAWA TIMUR	Rp12.179.000.000.000	16.474.181.647.770	0,74
KALIMANTAN BARAT	Rp1.445.912.639.000	275.082.961.214	1,13
KALIMANTAN TENGAH	Rp1.088.380.040.000	666.248.165.660	1,63
KALIMANTAN SELATAN	Rp2.685.646.913.000	1.003.619.451.600	2,68
KALIMANTAN TIMUR	Rp3.034.590.000.000	1.443.466.566.533	2,10
SULAWESI UTARA	Rp908.800.896.000	648.723.290.575	1,40
SULAWESI TENGAH	Rp782.619.046.300	1.774.428.148.063	0,44
SULAWESI SELATAN	Rp3.314.207.500.000	2.808.340.613.760	1,18
SULAWESI TENGGARA	Rp628.118.997.000	930.708.179.275	0,67
BALI	Rp2.901.766.388.675	882.084.701.517	3,29
NUSA TENGGARA BARAT	Rp1.122.139.007.935	2.797.494.872.083	0,40
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp766.961.319.888	4.835.378.479.225	0,16
MALUKU	Rp335.588.052.287	1.438.991.707.167	0,23
PAPUA	Rp1.030.423.565.000	6.260.656.632.533	0,16
MALUKU UTARA	Rp364.562.246.169	328.527.623.790	1,11
BANTEN	Rp5.444.173.000.000	3.468.557.077.440	1,57
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp557.198.594.110	326.972.431.648	1,70
GORONTALO	Rp326.098.685.000	709.909.493.440	0,46
KEP. RIAU	Rp1.001.764.658.037	846.647.514.977	1,18
PAPUA BARAT	Rp262.246.500.000	1.666.775.179.370	0,16
SULAWESI BARAT	Rp252.443.859.051	475.635.070.300	0,53
KALIMANTAN UTARA	Rp293.334.558.388	253.182.323.093	1,16

LAMPIRAN 6

Data Dana Komponen Retribusi Daerah (RD), Biaya Minimum PenghapusanKemiskinan (P_b) dan Rasio Kemampuan (Y_{RD})

Provinsi (i)	RD	P_b (dalam Rp.)	Y_{RD}
ACEH	Rp10.068.000.000	4.240.310.112.397	0,00
SUMATERA UTARA	Rp33.959.567.600	6.553.827.175.589	0,01
SUMATERA BARAT	Rp19.945.846.000	1.242.856.666.510	0,02
RIAU	Rp14.000.000.000	2.308.874.356.800	0,01
JAMBI	Rp20.901.481.500	1.161.267.565.480	0,02
SUMATERA SELATAN	Rp14.542.756.000	4.020.372.718.560	0,00
BENGKULU	Rp14.924.662.000	1.554.780.380.700	0,01
LAMPUNG	Rp5.706.996.000	3.907.738.498.727	0,00
DKI JAKARTA	Rp677.885.370.000	2.251.715.444.253	0,30
JAWA BARAT	Rp58.245.147.484	14.308.916.378.225	0,00
JAWA TENGAH	Rp99.766.182.000	13.371.661.409.985	0,01
DI YOGYAKARTA	Rp38.797.469.715	1.660.693.855.590	0,02
JAWA TIMUR	Rp120.081.924.000	16.474.181.647.770	0,01
KALIMANTAN BARAT	Rp35.942.515.000	275.082.961.214	0,03
KALIMANTAN TENGAH	Rp9.934.994.000	666.248.165.660	0,01
KALIMANTAN SELATAN	Rp25.460.405.000	1.003.619.451.600	0,03
KALIMANTAN TIMUR	Rp23.133.125.000	1.443.466.566.533	0,02
SULAWESI UTARA	Rp73.936.400.000	648.723.290.575	0,11
SULAWESI TENGAH	Rp5.155.511.950	1.774.428.148.063	0,00
SULAWESI SELATAN	Rp90.140.041.800	2.808.340.613.760	0,03
SULAWESI TENGGARA	Rp11.971.877.210	930.708.179.275	0,01
BALI	Rp48.738.042.608	882.084.701.517	0,06
NUSA TENGGARA BARAT	Rp18.459.358.000	2.797.494.872.083	0,01
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp25.821.710.000	4.835.378.479.225	0,01
MALUKU	Rp79.932.620.369	1.438.991.707.167	0,06
PAPUA	Rp82.930.263.480	6.260.656.632.533	0,01
MALUKU UTARA	Rp66.388.300.000	328.527.623.790	0,20
BANTEN	Rp20.891.830.000	3.468.557.077.440	0,01
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp15.448.205.015	326.972.431.648	0,05
GORONTALO	Rp6.000.000.000	709.909.493.440	0,01
KEP. RIAU	Rp8.810.000.000	846.647.514.977	0,01
PAPUA BARAT	Rp1.622.250.000	1.666.775.179.370	0,00
SULAWESI BARAT	Rp20.790.000.000	475.635.070.300	0,04
KALIMANTAN UTARA	Rp140.000.000	253.182.323.093	0,00

LAMPIRAN 7

Data Komponen Dana Perimbangan (*Daper*), Biaya Minimum PenghapusanKemiskinan (P_b) dan Rasio Kemampuan (Y_{Daper})

Provinsi (<i>i</i>)	<i>Daper</i>	P_b (dalam Rp.)	Y_{Daper}
ACEH	Rp3.741.189.009.600	4.240.310.112.397	0,88
SUMATERA UTARA	Rp7.235.420.477.680	6.553.827.175.589	1,10
SUMATERA BARAT	Rp3.990.886.148.502	1.242.856.666.510	3,21
RIAU	Rp5.120.242.595.981	2.308.874.356.800	2,22
JAMBI	Rp2.766.192.134.604	1.161.267.565.480	2,38
SUMATERA SELATAN	Rp5.175.402.210.000	4.020.372.718.560	1,29
BENGKULU	Rp2.132.917.440.228	1.554.780.380.700	1,37
LAMPUNG	Rp4.031.511.697.614	3.907.738.498.727	1,03
DKI JAKARTA	Rp18.770.211.233.000	2.251.715.444.253	8,34
JAWA BARAT	Rp13.987.089.323.786	14.308.916.378.225	0,98
JAWA TENGAH	Rp11.414.817.176.000	13.371.661.409.985	0,85
DI YOGYAKARTA	Rp2.461.741.043.739	1.660.693.855.590	1,48
JAWA TIMUR	Rp13.025.490.926.000	16.474.181.647.770	0,79
KALIMANTAN BARAT	Rp3.413.705.136.000	275.082.961.214	2,68
KALIMANTAN TENGAH	Rp2.615.492.050.226	666.248.165.660	3,93
KALIMANTAN SELATAN	Rp2.261.014.391.000	1.003.619.451.600	2,25
KALIMANTAN TIMUR	Rp4.092.045.390.000	1.443.466.566.533	2,83
SULAWESI UTARA	Rp2.429.190.571.000	648.723.290.575	3,74
SULAWESI TENGAH	Rp2.646.828.119.800	1.774.428.148.063	1,49
SULAWESI SELATAN	Rp5.158.708.141.000	2.808.340.613.760	1,84
SULAWESI TENGGARA	Rp2.748.755.754.146	930.708.179.275	2,95
BALI	Rp2.673.596.252.308	882.084.701.517	3,03
NUSA TENGGARA BARAT	Rp3.222.521.202.310	2.797.494.872.083	1,15
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp3.700.529.340.696	4.835.378.479.225	0,77
MALUKU	Rp2.333.050.345.000	1.438.991.707.167	1,62
PAPUA	Rp4.419.279.187.000	6.260.656.632.533	0,71
MALUKU UTARA	Rp1.907.792.409.000	328.527.623.790	5,81
BANTEN	Rp4.118.564.461.000	3.468.557.077.440	1,19
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp1.666.665.913.570	326.972.431.648	5,10
GORONTALO	Rp1.467.294.144.014	709.909.493.440	2,07
KEP. RIAU	Rp2.096.085.459.062	846.647.514.977	2,48
PAPUA BARAT	Rp3.196.319.386.190	1.666.775.179.370	1,92
SULAWESI BARAT	Rp1.512.701.624.000	475.635.070.300	3,18
KALIMANTAN UTARA	Rp1.800.696.737.000	253.182.323.093	7,11

LAMPIRAN 8

Data Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK), Biaya Minimum Penghapusan

Kemiskinan (P_b) dan Rasio Kemampuan (Y_{DAK})

Provinsi (i)	DAK	P_b (dalam Rp.)	Y_{DAK}
ACEH	Rp1.560.836.260.000	4.240.310.112.397	0,37
SUMATERA UTARA	Rp4.028.793.501.000	6.553.827.175.589	0,61
SUMATERA BARAT	Rp1.764.826.227.000	1.242.856.666.510	1,42
RIAU	Rp1.686.338.599.000	2.308.874.356.800	0,73
JAMBI	Rp967.584.195.000	1.161.267.565.480	0,83
SUMATERA SELATAN	Rp2.017.260.971.000	4.020.372.718.560	0,50
BENGKULU	Rp698.654.088.000	1.554.780.380.700	0,45
LAMPUNG	Rp1.902.233.143.000	3.907.738.498.727	0,49
DKI JAKARTA	Rp3.148.971.878.000	2.251.715.444.253	1,40
JAWA BARAT	Rp9.271.387.610.000	14.308.916.378.225	0,65
JAWA TENGAH	Rp6.739.830.931.000	13.371.661.409.985	0,50
DI YOGYAKARTA	Rp949.084.379.000	1.660.693.855.590	0,57
JAWA TIMUR	Rp7.298.679.584.000	16.474.181.647.770	0,44
KALIMANTAN BARAT	Rp1.516.275.910.000	275.082.961.214	1,19
KALIMANTAN TENGAH	Rp691.371.136.500	666.248.165.660	1,04
KALIMANTAN SELATAN	Rp756.875.482.000	1.003.619.451.600	0,75
KALIMANTAN TIMUR	Rp1.133.767.347.000	1.443.466.566.533	0,79
SULAWESI UTARA	Rp990.544.016.000	648.723.290.575	1,53
SULAWESI TENGAH	Rp970.464.430.000	1.774.428.148.063	0,55
SULAWESI SELATAN	Rp2.595.323.502.000	2.808.340.613.760	0,92
SULAWESI TENGGARA	Rp1.047.428.797.000	930.708.179.275	1,13
BALI	Rp1.156.284.908.000	882.084.701.517	1,31
NUSA TENGGARA BARAT	Rp1.372.422.968.000	2.797.494.872.083	0,49
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp1.829.232.986.000	4.835.378.479.225	0,38
MALUKU	Rp774.788.871.000	1.438.991.707.167	0,54
PAPUA	Rp1.242.997.670.000	6.260.656.632.533	0,20
MALUKU UTARA	Rp582.354.704.000	328.527.623.790	1,77
BANTEN	Rp2.377.527.706.000	3.468.557.077.440	0,69
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp455.718.557.000	326.972.431.648	1,39
GORONTALO	Rp413.822.549.000	709.909.493.440	0,58
KEP. RIAU	Rp552.049.537.000	846.647.514.977	0,65
PAPUA BARAT	Rp419.628.903.000	1.666.775.179.370	0,25
SULAWESI BARAT	Rp509.140.875.000	475.635.070.300	1,07
KALIMANTAN UTARA	Rp308.016.815.000	253.182.323.093	1,22

LAMPIRAN 9

Data Komponen Hibah (H), Biaya Minimum Penghapusan Kemiskinan (P_b)dan Rasio Kemampuan (Y_H)

Provinsi (i)	H	P_b (dalam Rp.)	Y_H
ACEH	Rp20.072.860.947	4.240.310.112.397	0,00
SUMATERA UTARA	Rp9.533.902.500	6.553.827.175.589	0,00
SUMATERA BARAT	Rp25.237.360.000	1.242.856.666.510	0,02
RIAU	Rp2.975.000.000	2.308.874.356.800	0,00
JAMBI	Rp1.606.412.000	1.161.267.565.480	0,00
SUMATERA SELATAN	Rp0	4.020.372.718.560	0,00
BENGKULU	Rp0	1.554.780.380.700	0,00
LAMPUNG	Rp17.558.000.000	3.907.738.498.727	0,00
DKI JAKARTA	Rp2.207.725.600.000	2.251.715.444.253	0,98
JAWA BARAT	Rp22.190.800.000	14.308.916.378.225	0,00
JAWA TENGAH	Rp35.342.500.000	13.371.661.409.985	0,00
DI YOGYAKARTA	Rp14.827.192.847	1.660.693.855.590	0,01
JAWA TIMUR	Rp0	16.474.181.647.770	0,00
KALIMANTAN BARAT	Rp0	275.082.961.214	0,00
KALIMANTAN TENGAH	Rp0	666.248.165.660	0,00
KALIMANTAN SELATAN	Rp32.301.851.000	1.003.619.451.600	0,03
KALIMANTAN TIMUR	Rp11.902.000.000	1.443.466.566.533	0,01
SULAWESI UTARA	Rp0	648.723.290.575	0,00
SULAWESI TENGAH	Rp10.626.598.000	1.774.428.148.063	0,01
SULAWESI SELATAN	Rp11.547.871.830	2.808.340.613.760	0,00
SULAWESI TENGGARA	Rp0	930.708.179.275	0,00
BALI	Rp4.890.000.000	882.084.701.517	0,01
NUSA TENGGARA BARAT	Rp13.870.510.900	2.797.494.872.083	0,00
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp10.663.129.000	4.835.378.479.225	0,00
MALUKU	Rp224.040.000	1.438.991.707.167	0,00
PAPUA	Rp500.000.000	6.260.656.632.533	0,00
MALUKU UTARA	Rp274.053.373.653	328.527.623.790	0,83
BANTEN	Rp5.670.000.000	3.468.557.077.440	0,00
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp0	326.972.431.648	0,00
GORONTALO	Rp500.000.000	709.909.493.440	0,00
KEP. RIAU	Rp0	846.647.514.977	0,00
PAPUA BARAT	Rp0	1.666.775.179.370	0,00
SULAWESI BARAT	Rp0	475.635.070.300	0,00
KALIMANTAN UTARA	Rp969.480.000	253.182.323.093	0,00

LAMPIRAN 10

Data Komponen Belanja Hibah (BH), Biaya Minimum PenghapusanKemiskinan (P_b) dan Rasio Kemampuan (Y_{BH})

Provinsi (i)	BH	P_b (dalam Rp.)	Y_{BH}
ACEH	Rp677.188.600.000	4.240.310.112.397	0,16
SUMATERA UTARA	Rp3.658.144.919.358	6.553.827.175.589	0,56
SUMATERA BARAT	Rp1.088.582.600.000	1.242.856.666.510	0,88
RIAU	Rp1.015.273.599.500	2.308.874.356.800	0,44
JAMBI	Rp647.306.190.000	1.161.267.565.480	0,56
SUMATERA SELATAN	Rp1.652.294.054.000	4.020.372.718.560	0,41
BENGKULU	Rp385.302.209.000	1.554.780.380.700	0,25
LAMPUNG	Rp1.507.323.000.000	3.907.738.498.727	0,39
DKI JAKARTA	Rp1.458.036.810.329	2.251.715.444.253	0,65
JAWA BARAT	Rp10.382.158.831.892	14.308.916.378.225	0,73
JAWA TENGAH	Rp4.943.528.652.000	13.371.661.409.985	0,37
DI YOGYAKARTA	Rp719.522.034.000	1.660.693.855.590	0,43
JAWA TIMUR	Rp6.430.091.440.000	16.474.181.647.770	0,39
KALIMANTAN BARAT	Rp854.992.300.000	275.082.961.214	0,67
KALIMANTAN TENGAH	Rp437.578.149.100	666.248.165.660	0,66
KALIMANTAN SELATAN	Rp556.180.000.000	1.003.619.451.600	0,55
KALIMANTAN TIMUR	Rp867.158.700.000	1.443.466.566.533	0,60
SULAWESI UTARA	Rp522.738.500.000	648.723.290.575	0,81
SULAWESI TENGAH	Rp601.681.000.000	1.774.428.148.063	0,34
SULAWESI SELATAN	Rp1.898.113.207.000	2.808.340.613.760	0,68
SULAWESI TENGGARA	Rp707.025.070.000	930.708.179.275	0,76
BALI	Rp1.073.267.400.000	882.084.701.517	1,22
NUSA TENGGARA BARAT	Rp980.897.000.000	2.797.494.872.083	0,35
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp1.348.419.750.000	4.835.378.479.225	0,28
MALUKU	Rp496.178.001.020	1.438.991.707.167	0,34
PAPUA	Rp1.089.144.837.924	6.260.656.632.533	0,17
MALUKU UTARA	Rp335.071.600.000	328.527.623.790	1,02
BANTEN	Rp2.376.144.610.000	3.468.557.077.440	0,69
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp311.439.900.000	326.972.431.648	0,95
GORONTALO	Rp296.034.032.500	709.909.493.440	0,42
KEP. RIAU	Rp384.464.250.000	846.647.514.977	0,45
PAPUA BARAT	Rp753.103.059.000	1.666.775.179.370	0,45
SULAWESI BARAT	Rp354.099.656.128	475.635.070.300	0,74
KALIMANTAN UTARA	Rp228.199.000.000	253.182.323.093	0,90

LAMPIRAN 11

Data Komponen Belanja Bantuan Sosial (*BBS*), Biaya MinimumPenghapusan Kemiskinan (P_b) dan Rasio Kemampuan (Y_{BBS})

Provinsi (<i>i</i>)	<i>BBS</i>	P_b (dalam Rp.)	Y_{BBS}
ACEH	Rp206.251.075.000	4.240.310.112.397	0,05
SUMATERA UTARA	Rp0	6.553.827.175.589	0,00
SUMATERA BARAT	Rp0	1.242.856.666.510	0,00
RIAU	Rp10.000.000.000	2.308.874.356.800	0,00
JAMBI	Rp0	1.161.267.565.480	0,00
SUMATERA SELATAN	Rp600.000.000	4.020.372.718.560	0,00
BENGKULU	Rp0	1.554.780.380.700	0,00
LAMPUNG	Rp6.000.000.000	3.907.738.498.727	0,00
DKI JAKARTA	Rp2.499.348.722.000	2.251.715.444.253	1,11
JAWA BARAT	Rp38.479.445.000	14.308.916.378.225	0,00
JAWA TENGAH	Rp248.562.000.000	13.371.661.409.985	0,02
DI YOGYAKARTA	Rp2.091.000.000	1.660.693.855.590	0,00
JAWA TIMUR	Rp10.000.000.000	16.474.181.647.770	0,00
KALIMANTAN BARAT	Rp720.000.000	275.082.961.214	0,00
KALIMANTAN TENGAH	Rp43.165.641.626	666.248.165.660	0,06
KALIMANTAN SELATAN	Rp0	1.003.619.451.600	0,00
KALIMANTAN TIMUR	Rp5.010.000.000	1.443.466.566.533	0,00
SULAWESI UTARA	Rp500.000.000	648.723.290.575	0,00
SULAWESI TENGAH	Rp1.000.000.000	1.774.428.148.063	0,00
SULAWESI SELATAN	Rp600.000.000	2.808.340.613.760	0,00
SULAWESI TENGGARA	Rp0	930.708.179.275	0,00
BALI	Rp12.640.400.000	882.084.701.517	0,01
NUSA TENGGARA BARAT	Rp17.455.318.500	2.797.494.872.083	0,01
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp23.151.000.000	4.835.378.479.225	0,00
MALUKU	Rp12.000.000.000	1.438.991.707.167	0,01
PAPUA	Rp91.509.700.000	6.260.656.632.533	0,01
MALUKU UTARA	Rp5.480.000.000	328.527.623.790	0,02
BANTEN	Rp138.877.500.000	3.468.557.077.440	0,04
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp943.000.000	326.972.431.648	0,00
GORONTALO	Rp2.103.000.000	709.909.493.440	0,00
KEP. RIAU	Rp6.500.873.632	846.647.514.977	0,01
PAPUA BARAT	Rp43.660.000.000	1.666.775.179.370	0,03
SULAWESI BARAT	Rp19.000.000.000	475.635.070.300	0,04
KALIMANTAN UTARA	Rp4.000.000.000	253.182.323.093	0,02

LAMPIRAN 12

Data Komponen Belanja Modal (BM), Biaya Minimum PenghapusanKemiskinan (P_b) dan Rasio Kemampuan (Y_{BM})

Provinsi (i)	BM	P_b (dalam Rp.)	Y_{BM}
ACEH	Rp2.529.205.111.425	4.240.310.112.397	0,60
SUMATERA UTARA	Rp1.790.920.557.785	6.553.827.175.589	0,27
SUMATERA BARAT	Rp950.436.027.269	1.242.856.666.510	0,76
RIAU	Rp2.545.984.515.117	2.308.874.356.800	1,10
JAMBI	Rp1.011.118.961.105	1.161.267.565.480	0,87
SUMATERA SELATAN	Rp1.768.324.028.745	4.020.372.718.560	0,44
BENGKULU	Rp1.010.591.426.294	1.554.780.380.700	0,65
LAMPUNG	Rp1.132.527.817.850	3.907.738.498.727	0,29
DKI JAKARTA	Rp15.881.105.921.301	2.251.715.444.253	7,05
JAWA BARAT	Rp2.291.591.432.720	14.308.916.378.225	0,16
JAWA TENGAH	Rp1.850.318.118.000	13.371.661.409.985	0,14
DI YOGYAKARTA	Rp1.040.563.177.076	1.660.693.855.590	0,63
JAWA TIMUR	Rp2.639.437.686.978	16.474.181.647.770	0,16
KALIMANTAN BARAT	Rp938.632.097.900	275.082.961.214	0,74
KALIMANTAN TENGAH	Rp585.104.199.125	666.248.165.660	0,88
KALIMANTAN SELATAN	Rp1.004.879.926.582	1.003.619.451.600	1,00
KALIMANTAN TIMUR	Rp925.853.953.600	1.443.466.566.533	0,64
SULAWESI UTARA	Rp697.064.709.420	648.723.290.575	1,07
SULAWESI TENGAH	Rp479.617.819.283	1.774.428.148.063	0,27
SULAWESI SELATAN	Rp1.059.508.067.228	2.808.340.613.760	0,38
SULAWESI TENGGARA	Rp774.553.129.529	930.708.179.275	0,83
BALI	Rp706.058.699.119	882.084.701.517	0,80
NUSA TENGGARA BARAT	Rp990.736.512.308	2.797.494.872.083	0,35
NUSA TENGGARA TIMUR	Rp582.791.379.218	4.835.378.479.225	0,12
MALUKU	Rp583.835.639.775	1.438.991.707.167	0,41
PAPUA	Rp3.530.217.099.935	6.260.656.632.533	0,56
MALUKU UTARA	Rp689.577.436.442	328.527.623.790	2,10
BANTEN	Rp1.515.648.566.322	3.468.557.077.440	0,44
KEP. BANGKA BELITUNG	Rp448.618.181.761	326.972.431.648	1,37
GORONTALO	Rp290.272.140.204	709.909.493.440	0,41
KEP. RIAU	Rp581.114.467.338	846.647.514.977	0,69
PAPUA BARAT	Rp1.040.173.110.473	1.666.775.179.370	0,62
SULAWESI BARAT	Rp540.094.348.826	475.635.070.300	1,14
KALIMANTAN UTARA	Rp951.352.690.355	253.182.323.093	3,76